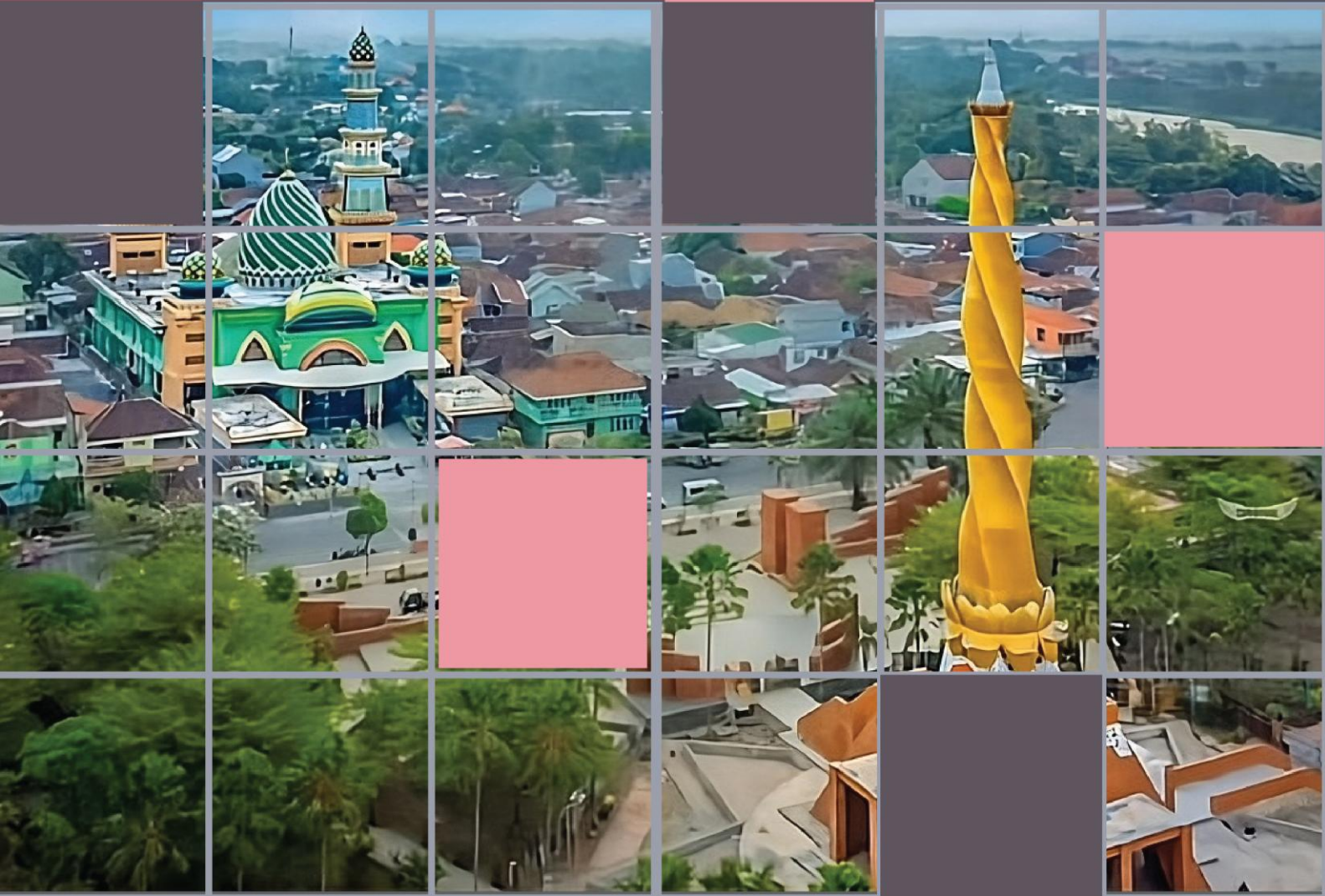




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Mojokerto

2025



# PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KOTA MOJOKERTO



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga "Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2025" dapat tersusun dengan baik. Buku ini merupakan hasil kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dengan PT. Cemerlang Statistika Indonesia (StatsMe).

Buku ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kependudukan di Kota Mojokerto, mencakup aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk serta kepemilikan dokumen kependudukan. Data yang digunakan bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024, data dari Lampid (lahir, mati, pindah, datang) Bulan Desember 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, Aplikasi SIAK Terpusat, serta berbagai data lintas Perangkat Daerah (PD) terkait.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya dalam mendukung perencanaan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta perumusan kebijakan yang berbasis data akurat dan terkini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga informasi yang tersaji dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Mojokerto dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mojokerto,

September 2025

Penyusun



# SAMBUTAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2025 ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2025 ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika kependudukan di Kota Mojokerto selama tahun 2025 yang memuat data tentang jumlah penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, dan kepemilikan dokumen kependudukan, serta disusun berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, yang menjadi pedoman dalam menyusun profil yang berbasis data terpercaya.

Kami berharap bahwa Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat besar bagi perencanaan pembangunan di Kota Mojokerto, serta menjadi acuan dalam mengambil kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Kami juga menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan, oleh karena itu kami dengan senang hati menerima kritik, saran, dan masukan yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Mojokerto, September 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Mojokerto

**IWANDOKO, S.E., M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19781001 200903 1 003



## DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN</b> .....	iii
<b>KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	2
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Dasar Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Ruang Lingkup .....	4
1.5 Pengertian Umum .....	5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH</b> .....	15
2.1 Visi dan Misi Kota Mojokerto .....	15
2.2 Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto .....	15
2.3 Aspek Geografis .....	26
2.4 Aspek Demografis .....	30
2.5 Gambaran Ekonomi Daerah .....	30
2.6 Potensi Daerah .....	32
2.6.1 Rencana Sistem Pusat Pelayanan .....	33
2.6.2 Rencana Pola Ruang Wilayah .....	35
<b>BAB III SUMBER DATA</b> .....	38
3.1 Registrasi .....	38
3.2 Non Registrasi .....	38
3.3 Data dari Lintas Sektoral .....	39
<b>BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN</b> .....	41
4.1 Kuantitas Penduduk .....	41
4.1.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin .....	41
4.1.2 Penduduk menurut Karakteristik Demografi .....	44



4.2	Kualitas Penduduk .....	65
4.2.1	Kesehatan.....	65
4.2.2	Pendidikan.....	72
4.2.3	Ekonomi .....	75
4.2.4	Sosial.....	80
4.3	Mobilitas Penduduk.....	80
4.3.1	Mobilitas Permanen.....	84
4.3.2	Urbanisasi .....	87
<b>BAB V KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN .....</b>		<b>90</b>
5.1	Kepemilikan Kartu Keluarga .....	90
5.2	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.....	91
5.3	Kepemilikan Akta.....	92
5.3.1	Akta Kelahiran .....	92
5.3.2	Akta Kematian.....	93
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>		<b>95</b>
6.1	Kesimpulan .....	95





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Sebaran Kelurahan Berdasarkan Kecamatan.....	29
<b>Tabel 2.2</b> Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Mojokerto Tahun 2020-2024 .....	32
<b>Tabel 2.3</b> Pusat Pelayanan Lingkungan di Kota Mojokerto .....	34
<b>Tabel 4.1</b> Rasio Jenis Kelamin Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	45
<b>Tabel 4.2</b> Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga di Kota Mojokerto Tahun 2024.....	48
<b>Tabel 4.3</b> Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan di Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	55
<b>Tabel 4.4</b> Angka Kematian Bayi Post-Neonatal di Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	69
<b>Tabel 4.5</b> Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan di Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	76
<b>Tabel 4.6</b> Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	80
<b>Tabel 4.7</b> Persentase Penduduk Kota di Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	87
<b>Tabel 4.8</b> Rasio Kota dan Desa di Kota Mojokerto Tahun 2024.....	88
<b>Tabel 5.1</b> Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Mojokerto .....	91





## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto .....	16
<b>Gambar 2.2</b> Peta Administratif Kota Mojokerto.....	27
<b>Gambar 2.3</b> Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan.....	29
<b>Gambar 2.4</b> Persentase Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin.....	30
<b>Gambar 4.1</b> Jumlah Penduduk Kota Mojokerto menurut Jenis Kelamin Tahun 2024 .....	41
<b>Gambar 4.2</b> Kepadatan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2024 Semester II...	42
<b>Gambar 4.3</b> Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	43
<b>Gambar 4.4</b> Piramida Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	46
<b>Gambar 4.5</b> Rasio Ketergantungan Kota Mojokerto Tahun 2024.....	47
<b>Gambar 4.6</b> Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga di Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	49
<b>Gambar 4.7</b> Hubungan dengan Kepala Keluarga Kota Mojokerto Tahun 2024...	50
<b>Gambar 4.8</b> Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Mojokerto Tahun 2024.....	51
<b>Gambar 4.9</b> Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur Kota Mojokerto Tahun 2024.....	52
<b>Gambar 4.10</b> Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin di Kota Mojokerto Tahun 2024.....	53
<b>Gambar 4.11</b> Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun 2024.....	54
<b>Gambar 4.12</b> Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	59
<b>Gambar 4.13</b> Jumlah Penduduk berdasarkan Agama di Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	59
<b>Gambar 4.14</b> Jumlah Penduduk berdasarkan Disabilitas di Kota Mojokerto Tahun 2024.....	60
<b>Gambar 4.15</b> Jumlah Penduduk berdasarkan Status Kawin di Kota Mojokerto Tahun 2024.....	61
<b>Gambar 4.16</b> Jumlah Kelahiran di Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	62
<b>Gambar 4.17</b> Angka Kelahiran Kasar di Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	63
<b>Gambar 4.18</b> Jumlah Kematian di Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	64

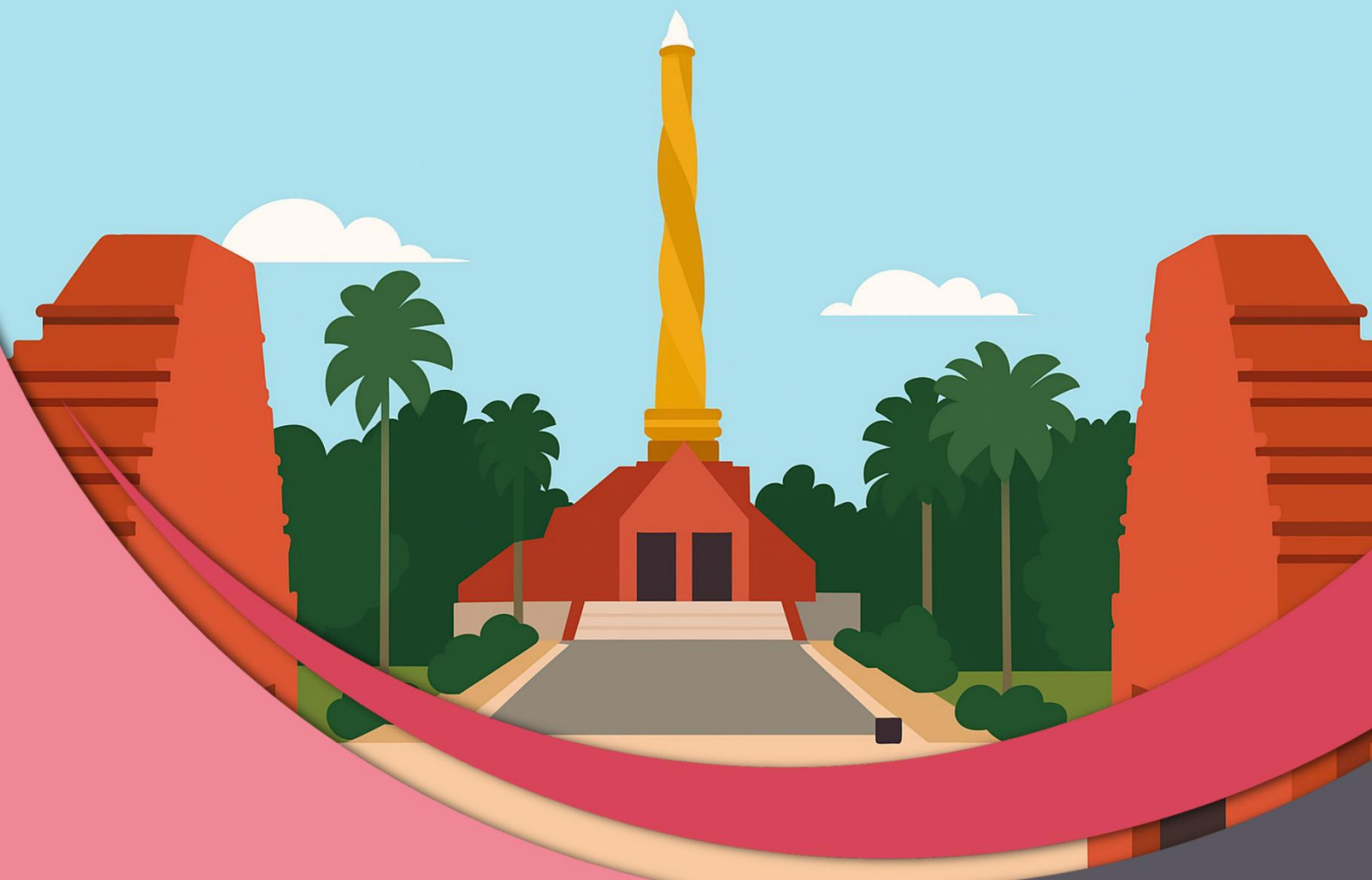


<b>Gambar 4.19</b> Angka Kematian Kasar di Kota Mojokerto Tahun 2024.....	65
<b>Gambar 4.20</b> Rasio Anak dan Perempuan di Kota Mojokerto Tahun 2024.....	66
<b>Gambar 4.21</b> Angka Kematian Bayi di Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	67
<b>Gambar 4.22</b> Angka Kematian Bayi Neonatal di Kota Mojokerto Tahun 2024...	68
<b>Gambar 4.23</b> Angka Kematian Anak di Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	70
<b>Gambar 4.24</b> Angka Kematian Balita di Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	71
<b>Gambar 4.25</b> Angka Partisipasi Kasar di Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	72
<b>Gambar 4.26</b> Angka Partisipasi Murni di Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	73
<b>Gambar 4.27</b> Jumlah Penduduk Putus Sekolah di Kota Mojokerto Tahun 2024	74
<b>Gambar 4.28</b> Jumlah Penduduk Bekerja dan Tidak Bekerja di Kota Mojokerto Tahun 2024.....	75
<b>Gambar 4.29</b> Proporsi Penduduk yang Menyandang Disabilitas di Kota Mojokerto Tahun 2024.....	82
<b>Gambar 4.30</b> Proporsi Penduduk Miskin Penerima Jaminan Kesehatan di Kota Mojokerto Tahun 2024.....	83
<b>Gambar 4.31</b> Angka Migrasi Masuk di Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	84
<b>Gambar 4.32</b> Angka Migrasi Keluar di Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	85
<b>Gambar 4.33</b> Angka Migrasi Neto di Kota Mojokerto Tahun 2024.....	86
<b>Gambar 5.1</b> Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Mojokerto Tahun 2024.....	90
<b>Gambar 5.2</b> Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Mojokerto .....	91
<b>Gambar 5.3</b> Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun di Kota Mojokerto Tahun 2024.....	92
<b>Gambar 5.4</b> Jumlah Penerbitan Akta Kematian di Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	93



# BAB I

# PENDAHULUAN





# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui pembangunan manusia seutuhnya. Salah satu aspek penting adalah kependudukan, karena perubahan demografi berpengaruh besar terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Informasi kependudukan yang akurat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang efektif serta sesuai kebutuhan masyarakat.

Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto menyusun Profil Perkembangan Kependudukan. Profil ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk, sekaligus menjadi masukan bagi pengembangan database kependudukan. Data tersebut diharapkan dapat menjadi landasan perencanaan pembangunan yang berbasis data valid dan akurat.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto akan menyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2025 yang memuat informasi tentang jumlah, kualitas, dan distribusi penduduk serta capaian program kependudukan di Kota Mojokerto. Buku ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memahami dinamika kependudukan, sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif, berbasis data akurat dan relevan, serta membantu pengambilan keputusan strategis untuk pembangunan berkelanjutan.



## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dari Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yaitu untuk menyajikan data dan informasi serta mendapatkan gambaran tentang kondisi perkembangan kependudukan di Kota Mojokerto.

Adapun tujuan dari Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data dan informasi bagi Pemerintah Kota Mojokerto dalam merumuskan dan menyusun kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan.
2. Memberikan informasi tentang perkembangan kependudukan dalam bentuk buku profil sehingga lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat maupun PD lain yang ada di Kota Mojokerto.

### 1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan berisi tentang latar belakang penyusunan, tujuan, ruang lingkup, dan pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam Profil Perkembangan Kependudukan;
2. Gambaran umum daerah memuat visi misi Kota Mojokerto, letak geografis daerah, kondisi demografis daerah, gambaran ekonomi daerah, dan potensi daerah;
3. Sumber data dalam penyusunan profil ini berasal dari registrasi, non registrasi, dan data dari lintas sektor



4. Perkembangan kependudukan memuat kuantitas penduduk, kualitas penduduk dan mobilitas penduduk; dan
5. Kepemilikan dokumen kependudukan memuat kepemilikan kartu keluarga, kepemilikan kartu tanda penduduk, dan kepemilikan akta.

### 1.5 Pengertian Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010, berikut merupakan istilah umum yang digunakan dalam Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2025.

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
3. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.





5. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana dan lain sebagainya. Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga inti/batih (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*).
6. Hubungan dengan Kepala Keluarga merupakan status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga. Hal ini diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak.
7. Karakteristik Kepala Keluarga merupakan salah satu informasi yang penting terutama dalam program pengentasan kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan lain-lain.
8. Kelahiran merupakan proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu ke dunia, dimulai dari tanda-tanda kelahiran (rasa mulas yang berangsur-angsur makin sering, makin lama makin kuat, rahim terasa kencang, keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir). Jumlah kelahiran menunjukkan banyaknya bayi yang lahir di suatu tempat serta periode tertentu.
9. Bekerja merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atas keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).
10. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.



11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.
12. Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan merupakan banyaknya penduduk yang bekerja yang diproporsikan berdasarkan jenis pekerjaan.
13. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami hambatan atau kesulitan dalam menjalankan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani, dan sosial secara layak.
14. Kebijakan Askeskin merupakan kebijakan kesehatan terhadap masyarakat miskin melalui peningkatan akses kesehatan dengan skema asuransi dimana pemerintah yang membayar preminya.

Menurut Badan Pusat Statistik di Kota Mojokerto dalam Angka 2025, berikut merupakan istilah umum yang digunakan dalam Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2025 (BPS, Kota Mojokerto dalam Angka, 2025).

1. Kepadatan Penduduk (*Population Density Ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu.
2. Piramida Penduduk adalah sesuatu yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat menggunakan jumlah absolut atau persentase, sumbu vertikal menunjukkan umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan, dasar piramida dimulai dengan kelompok umur



termuda dan dilanjutkan ke atas untuk kelompok umur yang lebih tua dan biasanya puncak piramida untuk kelompok umur yang lebih tua sering dibuat dengan sistem umur terbuka ( $\geq 75$ ) dan bagian kiri piramida digunakan untuk mewakili penduduk laki - laki dan bagian kanan untuk penduduk perempuan.

3. Laju Pertumbuhan Penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya.
4. Rasio Jenis Kelamin merupakan suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.
5. Angka Partisipasi Kasar merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C turut diperhitungkan).
6. Angka Partisipasi Murni merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C turut diperhitungkan).
7. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.



8. Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja.
9. Angka Migrasi Masuk merupakan angka yang menunjukkan banyaknya migrasi masuk selama 1 tahun untuk setiap 1.000 orang penduduk yang terjadi pada suatu daerah.
10. Angka Migrasi Keluar merupakan angka yang menunjukkan banyaknya migrasi keluar selama 1 tahun setiap 1.000 penduduk yang terjadi pada suatu daerah.
11. Angka Migrasi Neto adalah angka yang menunjukkan banyaknya migran neto (masuk dikurangi keluar) per 1.000 penduduk suatu daerah.
12. Rasio Kota dan Desa menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk kota dan desa pada suatu daerah dan waktu tertentu.

Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistik milik Badan Pusat Statistik, berikut merupakan istilah umum yang digunakan dalam Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2025 (Sirusa, BPS).

1. Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (<15 tahun dan 65 tahun ke atas).
2. Rasio Anak Perempuan (*Child Woman Ratio*) merupakan perbandingan jumlah anak umur 0-4 tahun dengan penduduk perempuan umur 15-49 tahun.



3. Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1.000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
4. Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*) adalah banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama.
5. Angka Kelahiran menurut Umur merupakan angka yang menunjukkan kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun.
6. Jumlah Kematian merupakan banyaknya penduduk yang meninggal di suatu daerah pada periode tertentu.
7. Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu.
8. Angka Kematian Bayi Neonatal adalah angka yang menunjukkan jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.
9. Angka Kematian Bayi *Eksogen* atau *Kematian Post-Neonatal* adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar (dinyatakan dengan per 1.000 kelahiran hidup).
10. Angka Kematian Anak merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian anak berusia 1-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Jadi, angka kematian anak tidak termasuk kematian bayi.



11. Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).
12. Angka Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.
13. Angka Penduduk Putus Sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun.

Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berikut merupakan istilah umum yang digunakan dalam Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2025 (Disdukcapil, 2018).

1. Tingkat Pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar.
2. Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.



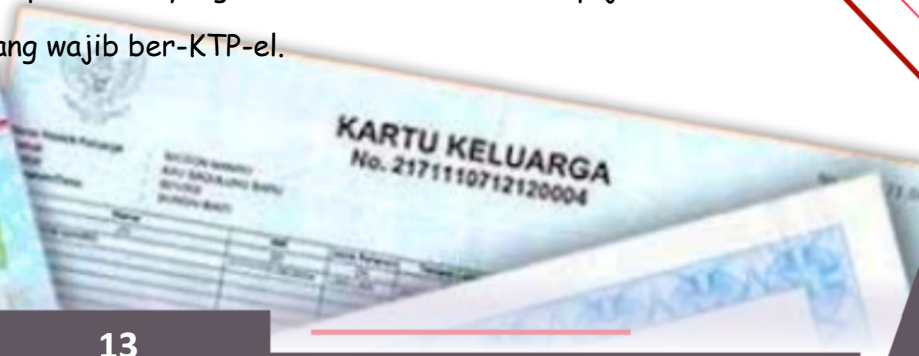
3. Jumlah Penduduk menurut Disabilitas merupakan bagian menyajikan banyaknya penduduk penyandang disabilitas berdasarkan jenis kedisabilitasannya.
4. Akta Kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit, dokter, bidan maupun kelurahan.
5. Akta Perkawinan merupakan sebuah dokumen dari ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.
6. Akta Perceraian atau yang disebut Akta Cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum.
7. Akta Pengakuan Anak merupakan dokumen yang memuat pengakuan secara hukum dari seorang ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut, pengakuan anak akan menimbulkan hubungan perdata antara anak yang diakui dengan ayah kandung, tetapi tidak menimbulkan hubungan perdata antara ayah kandung dengan ibu kandung.
8. Akta Pengangkatan Anak adalah suatu dokumen yang memuat pengalihan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.



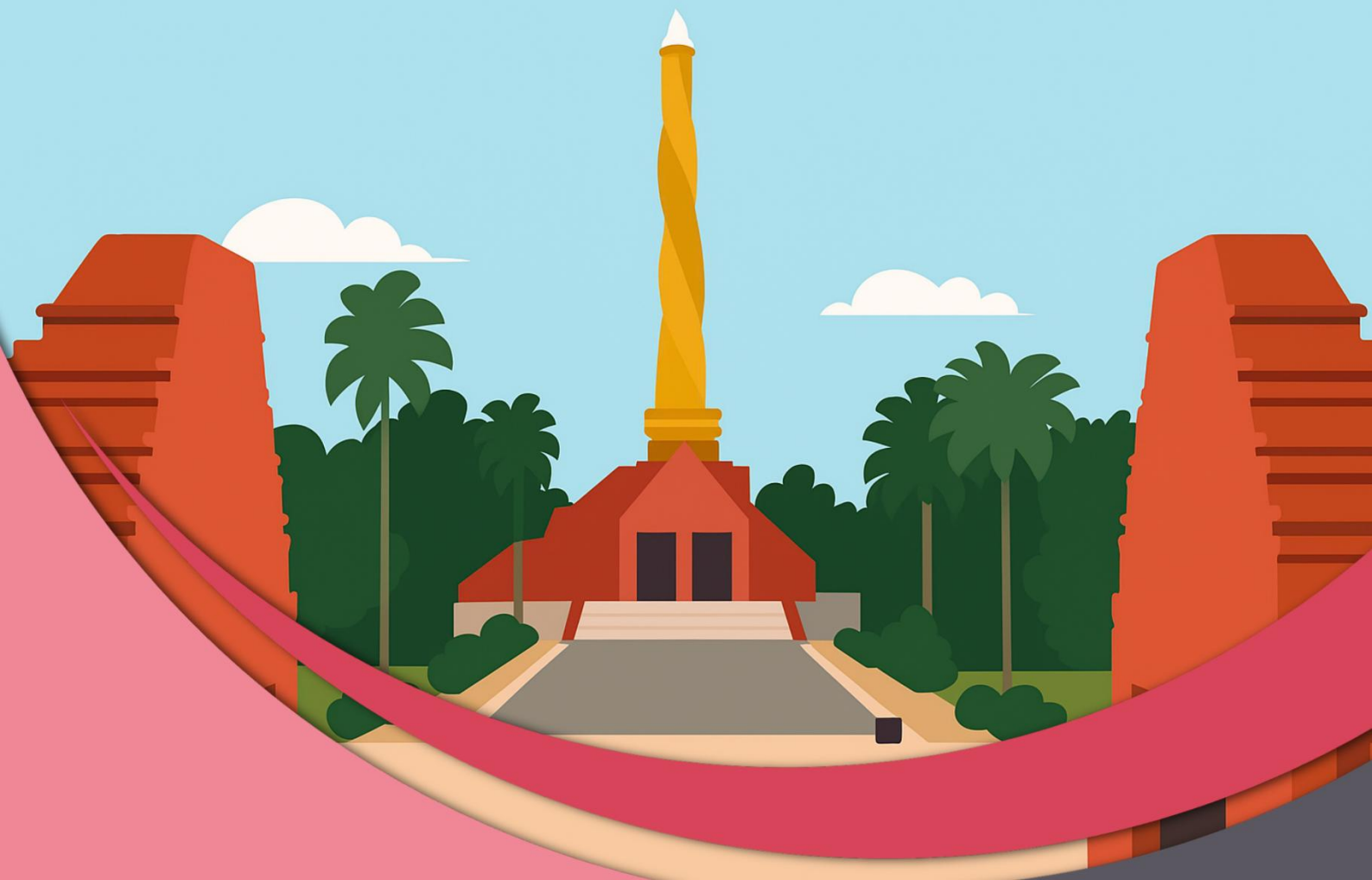
9. Akta Pengesahan Anak adalah dokumen pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut. Dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2025, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berikut merupakan istilah umum yang digunakan dalam Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2025.

1. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat mengukur banyaknya penduduk yang memiliki KTP-el terhadap jumlah seluruh penduduk yang wajib ber-KTP-el.



**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM**  
**WILAYAH**





## BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH

### 2.1 Visi dan Misi Kota Mojokerto

Visi merupakan bentuk *statement* yang didalamnya terdapat sebuah gambaran mengenai cita - cita suatu instansi yang akan diwujudkan pada masa mendatang. Adapun visi dari Kota Mojokerto yaitu **Terwujudnya Kota Mojokerto yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Bersih, Asri dan Berbudaya**

Untuk mewujudkan visi di atas maka dijabarkan misi Kota Mojokerto sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang adil dan sejahtera.
2. Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang maju dan mandiri melalui pendidikan, kesehatan dan pengembangan teknologi.
3. Mewujudkan Kota Mojokerto menjadi pusat pertumbuhan regional.
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).
5. Mewujudkan Kota Mojokerto yang asri dan lestari.
6. Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto berbudaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

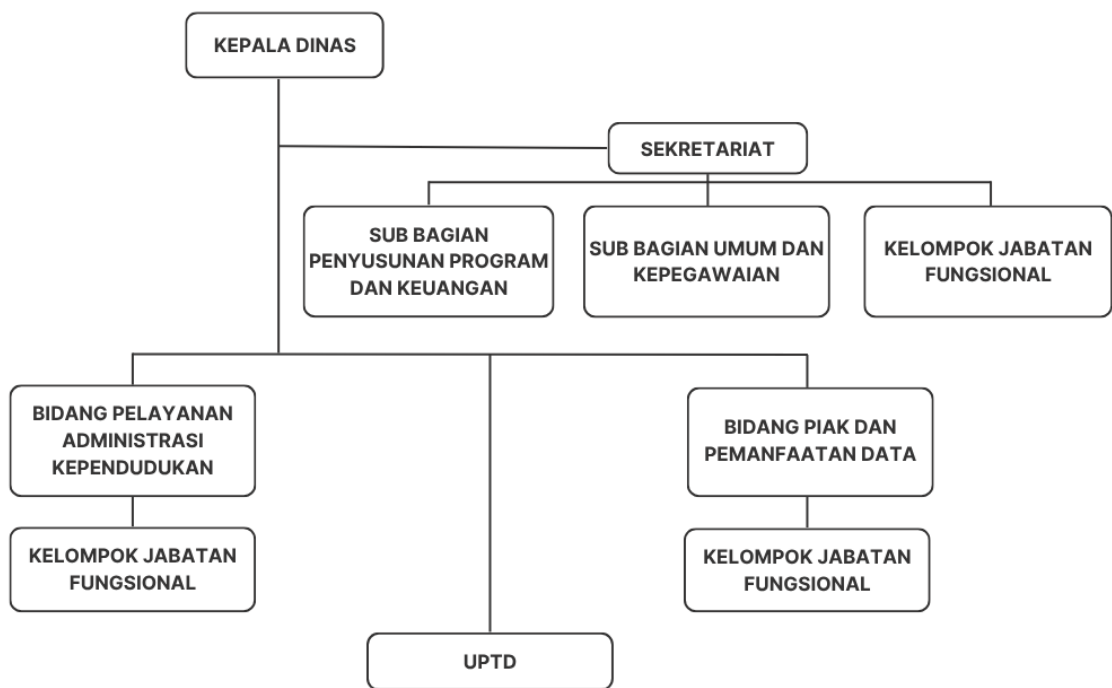
### 2.2 Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 69 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, menjelaskan bahwa Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:



1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1** Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto  
 Sumber: Lampiran Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Berikut uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto:

### 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Pelayanan pencatatan sipil;
- c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Penyusunan profil kependudukan;
- e. Pelaksanaan SPP dan SOP;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan pengelolaan urusan



keuangan, kepegawaian dan umum serta mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Renstra dan Renja;
- b. Penyusunan RKA;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
- d. Penyusunan PK;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- g. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- h. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- i. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- j. Pengelolaan anggaran belanja;
- k. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- l. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;
- m. Pengoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- n. Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;
- o. Pelaksanaan SPI;
- p. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- q. Pengoordinasian kegiatan di Dinas;
- r. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Dinas;
- s. Pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) Dinas;
- t. Pengoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI)



- u. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;
- v. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- w. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Daerah;
- x. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- y. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto terdiri dari Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan melaksanakan tugas perencanaan, penyusunan program, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Renstra dan Renja;
- b. Penyusunan RKA;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
- d. Penyusunan PK;
- e. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;



- g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- h. Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;
- i. Pelaksanaan SPI;
- j. Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
- k. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
- l. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Dinas;
- m. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Dinas;
- n. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan Dinas;
- o. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Dinas;
- p. Penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- q. Penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- r. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- s. Pelaksanaan konsultasi terkait pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- t. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan,



kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan, evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.
- b. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
- c. Pelaksanaan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- f. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- g. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas;
- h. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- i. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- j. Pelaksanaan SPI;
- k. Penghimpunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- l. Penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- m. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- n. Pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- o. Penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- p. Pelaksanaan konsultasi terkait pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;



- q. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

### 3. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi kependudukan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:





- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- h. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk;
- i. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang kependudukan dan mobilitas penduduk;
- j. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- k. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
- l. Pelaksanaan SPP dan SOP;
- m. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### 4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta fasilitasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;



- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
- g. Pelaksanaan SPP dan SOP;
- h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)**

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi dan uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ditetapkan dalam peraturan Walikota tersendiri.

#### **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama melalui Jabatan Administrator masing-masing.

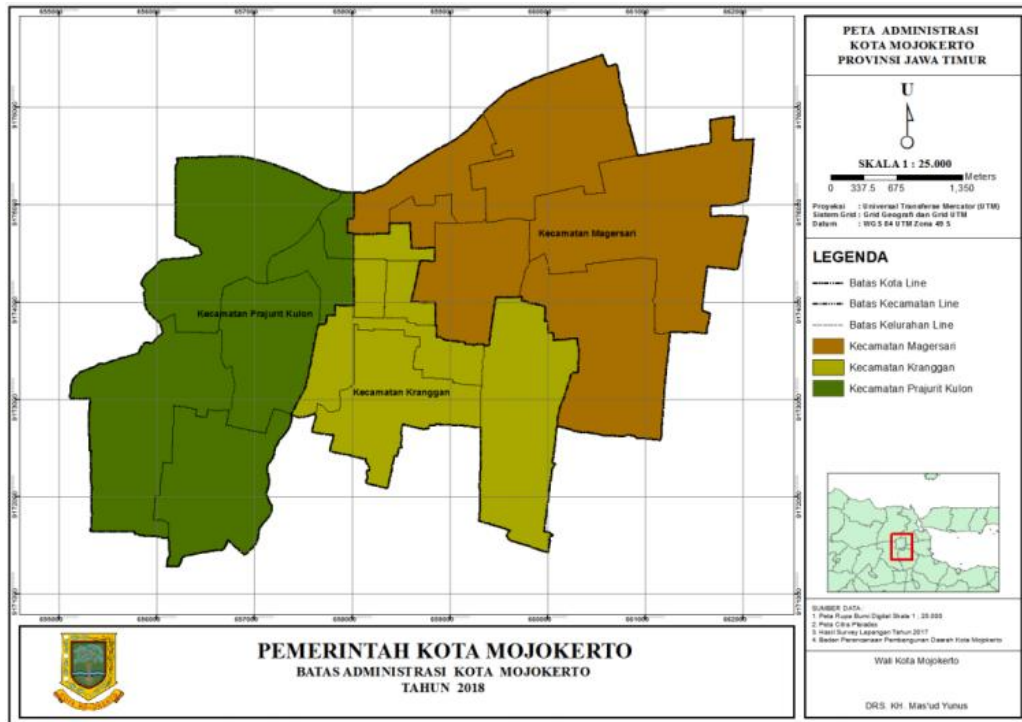


- d. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai masing-masing pengelompokan uraian tugas Kelompok Sub-substansi.
- e. Subkoordinator ditetapkan pejabat pembina kepegawaian atas usulan Kepala Dinas.
- f. Jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- g. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 2.3 Aspek Geografis

Secara astronomis Kota Mojokerto terletak antara 7° 28' Lintang Selatan dan antara 112° 26' Bujur Timur dengan luas wilayah Kota Mojokerto mencapai 20,48 km<sup>2</sup>. Wilayah ini terdiri atas 3 kecamatan, dan 18 kelurahan. Berdasarkan batas administratif dan posisi geografisnya, Kota Mojokerto memiliki batas dengan Kabupaten Mojokerto

- **Sebelah utara** : Sungai Brantas;
- **Sebelah timur** : Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;
- **Sebelah selatan**: Kecamatan Sooko dan Puri Kabupaten Mojokerto;
- **Sebelah barat** : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.



Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Mojokerto

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2025

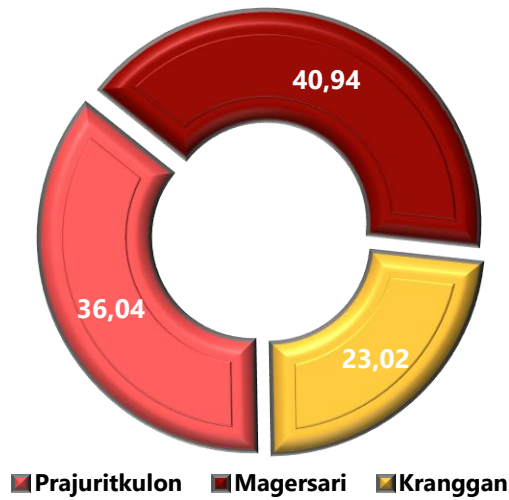




Kota Mojokerto memiliki posisi strategis sebagai bagian dari kawasan penyangga utama bagi wilayah metropolitan Surabaya. Letaknya yang berada di jalur utama Surabaya-Yogyakarta menjadikan Kota Mojokerto sebagai simpul transportasi yang penting di Jawa Timur bagian tengah. Dengan posisi tersebut menjadikan Kota Mojokerto berkembang sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, industri kecil-menengah, dan pendidikan. Didukung oleh jaringan infrastruktur yang memadai serta konektivitas yang baik melalui jalan tol dan jalur kereta api, Kota Mojokerto juga menjadi pintu gerbang menuju kawasan wisata sejarah dan budaya di sekitar Trowulan yang dikenal sebagai pusat Kerajaan Majapahit. Potensi sejarah dan budaya ini menjadikan Kota Mojokerto tidak hanya sebagai kota penyangga, tetapi juga sebagai destinasi wisata edukatif dan *heritage* yang memiliki daya tarik tersendiri di Jawa Timur.

Luas wilayah Kota Mojokerto sebesar 20,48 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Prajurit Kulon, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Kranggan. Berikut ditampilkan luas wilayah dan persentase tiap kecamatan di Kota Mojokerto (BPS, Kota Mojokerto dalam Angka 2025).

Kecamatan Magersari adalah kecamatan dengan wilayah terluas, mencakup 8,27 km<sup>2</sup> dengan persentase luas wilayah 40,94 persen dari seluruh wilayah Kota Mojokerto. Terluas kedua adalah Kecamatan Prajuritkulon yaitu mencakup 7,28 km<sup>2</sup> dan terakhir adalah Kecamatan Kranggan dengan luas 4,65 km<sup>2</sup>. Dari tiga kecamatan di Kota Mojokerto, masing-masing kecamatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan sehingga secara keseluruhan terdapat 18 kelurahan di Kota Mojokerto. Berikut tabel nama kelurahan pada tiap kecamatan di Kota Mojokerto.



Gambar 2.3 Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2025

Tabel 2.1 Sebaran Kelurahan Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Prajuritkulon	Surodinawan
		Prajuritkulon
		Blooto
		Mentikan
		Kauman
		Pulorejo
2	Magersari	Gunung Gedangan
		Kedundung
		Balongsari
		Gedongan
		Magersari
		Wates
3	Kranggan	Kranggan
		Meri
		Jagalan
		Miji
		Sentanan
		Purwotengah

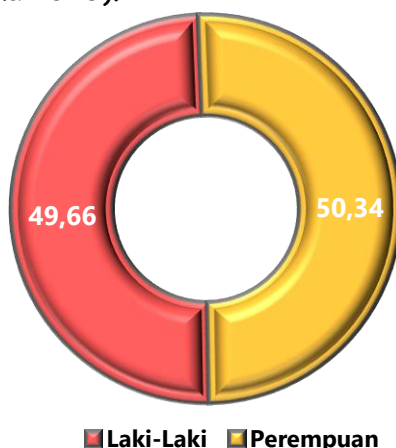
Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2025



## 2.4 Aspek Demografis

Dalam suatu wilayah, keberadaan penduduk sangat penting bagi proses pembangunan daerah. Oleh karena itu, penduduk akan menjadi beban bagi suatu daerah apabila tidak dikelola dengan baik, dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, jumlah penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2024 mencapai 142.272 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 70.647 jiwa atau 49,66 persen dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 71.625 jiwa atau 50,34 persen. (BPS, Kota Mojokerto dalam Angka 2025).



■ Laki-Laki ■ Perempuan

Gambar 2.4 Persentase Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2025

## 2.5 Gambaran Ekonomi Daerah

Nilai PDRB Kota Mojokerto atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 8.612,33 miliar rupiah. Lapangan usaha yang memiliki andil terbesar di antaranya perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mampu menyumbang PDRB sebesar 30,62 persen, informasi dan komunikasi sebesar 15,04 persen, dan industri pengolahan sebesar 13,07 persen. Sementara lapangan usaha yang memiliki andil terendah adalah pertambangan dan penggalian sebesar 0,00 persen.



Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 5.399,62 miliar rupiah pada tahun 2023 menjadi 5.686,79 miliar rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 terjadi peningkatan pada perekonomian Kota Mojokerto sebesar 287,17 miliar rupiah. Peningkatan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi tiap lapangan usaha.

Kondisi serupa juga terjadi pada laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto. Pada tahun 2024, Kota Mojokerto memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32, artinya perekonomian masyarakat Kota Mojokerto semakin membaik dari tahun ke tahun. PDRB menurut pengeluaran paling banyak berada pada pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 6.450,49 miliar rupiah. Berikut merupakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kota Mojokerto (Badan Pusat Statistik, 2025).





**Tabel 2.2** Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Mojokerto Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,16	-2,41	-3,09	-7,06	- 2,29
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	-3,55	2,98	6,06	-13,91	3,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,33	2,56	5,79	5,24	4,95
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,39	6,17	1,61	3,43	1,22
F	Konstruksi	-6,26	0,86	6,86	0,43	4,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-9,20	6,54	6,42	5,53	3,54
H	Transportasi dan Pergudangan	-6,43	5,91	15,19	10,71	9,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-8,16	1,45	7,75	8,99	5,51
J	Informasi dan Komunikasi	7,87	5,60	4,46	6,00	7,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,02	0,51	0,63	2,75	6,80
L	Real Estate	3,27	0,25	3,70	3,00	5,55
M,N	Jasa Perusahaan	-7,24	0,87	1,54	7,54	5,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-2,42	-0,20	0,41	0,67	5,17
P	Jasa Pendidikan	2,88	0,31	1,57	3,57	5,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,06	3,94	0,70	5,45	6,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	-14,50	3,71	14,81	4,91	8,35
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>-3,69</b>	<b>3,65</b>	<b>5,56</b>	<b>2,79</b>	<b>5,32</b>

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2025

## 2.6 Potensi Daerah

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Mojokerto 2024-2026, potensi pengembangan wilayah, ditentukan berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk



dikembangkan sebagai kawasan budidaya dengan berpedoman pada RTRW. Kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan budi daya di Kota Mojokerto antara lain adalah: kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan ruang bagi kegiatan sektor informal, kawasan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan lainnya terdiri dari: kawasan pertanian, kawasan pelayanan umum (meliputi: kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan peribadatan), dan kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

### 2.6.1 Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Rencana sistem pusat pelayanan kota diikuti dengan pengembangan infrastruktur kota untuk menunjang kegiatan perkotaan sesuai dengan fungsi daerah sebagai pusat Kegiatan Wilayah Mojokerto dan sekitarnya. Jika dilihat dari struktur ruang wilayahnya, wilayah Kota Mojokerto diwujudkan berdasarkan arahan: rencana pengembangan sistem pusat pelayanan kegiatan kota; rencana sistem jaringan prasarana utama wilayah kota; dan rencana sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem pusat pelayanan kegiatan kota terdiri atas:

- a. Rencana pusat pelayanan kota;
- b. Rencana sub pusat pelayanan kota
- c. Rencana pusat lingkungan

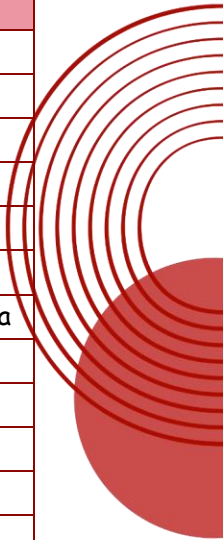
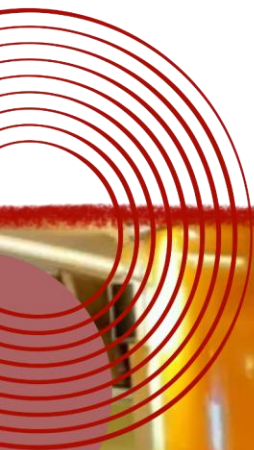
Rencana pusat pelayanan kota terpusat di kantor Walikota, Jalan Gajah Mada Kelurahan Balongsari dengan kegiatan utama yaitu pusat perdagangan dan jasa meliputi wilayah sekitar Pasar Tanjung Anyar dan Jl. Majapahit di wilayah Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Purwotengah, dan Kelurahan Jagalan.



Tabel 2.3 Pusat Pelayanan Lingkungan di Kota Mojokerto

No	Sub Pusat Pelayanan Kota	Kelurahan	Fungsi Pelayanan
1	Sub Pusat Pelayanan Kota A	Balongsari, Mentikan, Kauman, Magersari, Gedangan, Purwotengah, Sentanan, Jagalan, Miji dan Kranggan	Perkantoran
			Pendidikan
			Peribadatan
			Perdagangan dan jasa
			Pariwisata
			Olahraga rekreatif
			Industri kecil/industri rumah tangga
2	Sub Pusat Pelayanan Kota B	Prajurit Kulon, Pulorejo, Blooto, Surodinawan	Pusat pemerintahan lokal
			Perkantoran
			Pendidikan
			Kesehatan
			Olahraga
			Industri kecil/industri rumah tangga
			Pertanian
3	Sub Pusat Pelayanan Kota C	Kedundung, Gunung Gedangan, Wates dan Meri	Pusat pemerintahan lokal
			Perdagangan dan jasa
			Industri kecil/industri rumah tangga
			Pertanian

Sumber: Peraturan Walikota Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024-2026





### 2.6.2 Rencana Pola Ruang Wilayah

Rencana pengembangan wilayah Kota Mojokerto terdiri dari kawasan lindung dengan luas kurang lebih 355,76 Ha dan Kawasan budi daya dengan luas kurang lebih 1.165,63 Ha. Adapun pembagian pola ruang wilayah di Kota Mojokerto dijelaskan sebagai berikut:

#### A. Kawasan Lindung

Kawasan peruntukan perlindungan setempat, meliputi:

- Kawasan perlindungan setempat.

Pengembangan kawasan perlindungan setempat meliputi daerah yaitu kawasan sempadan sungai yang meliputi: Sungai Brantas, Brangkal, Sadar, Cemporat, Ngrayung, Watu Dakon, dan Ngotok/Pulo.

- Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kawasan Ruang Terbuka Hijau RTH, tersebar di seluruh wilayah kota diarahkan penyediaan sampai akhir tahun perencanaan dengan proporsi RTH publik dengan luas kurang lebih 329,60 hektar atau 20,02% dan RTH privat dengan luas kurang lebih 300,98 hektar atau 18,28%.

- Kawasan cagar budaya.

Kawasan cagar budaya meliputi (Makam Pahlawan Nasional R. Panji Soroso, Pendopo Kabupaten Mojokerto, Bangunan Tua Dinas Pengairan, Masjid Agung Al-Fatah dan Makorem 082 Citra Panca Yudha Jaya).

- Kawasan rawan bencana.

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan rawan banjir yakni: Kelurahan Kauman; Gedongan; Purwotengah; Jagalan; Sentanan; Mentikan; Kranggan; Miji; Pajuritkulon; Blooto; Surodinawan;



Magersari; Wates; Kedundung; Balongsari; Gunung Gedangan; dan Meri.

### B. Kawasan Budi Daya

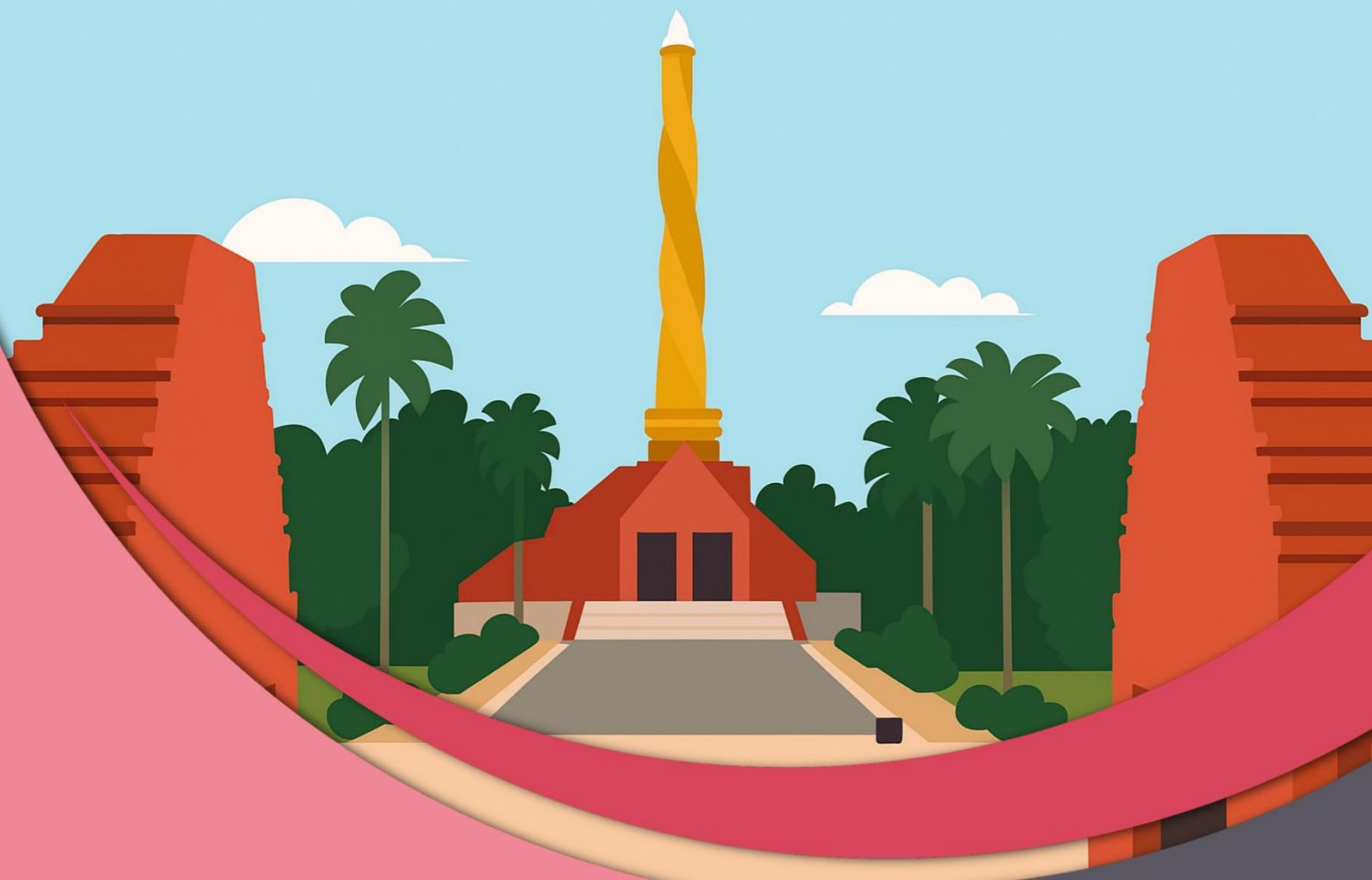
Kawasan budi daya meliputi:

- Kawasan Perumahan;
- Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- Kawasan Perkantoran;
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Pariwisata;
- Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau;
- Kawasan Ruang Evakuasi Bencana;
- Kawasan Ruang Bagi Ruang Kegiatan Sektor Informal;
- Kawasan Peruntukan Lainnya (Pertanian);
- Kawasan Pelayanan Umum; dan
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan.



# BAB III

# SUMBER DATA





## BAB III SUMBER DATA

Dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2025, data yang akurat dan terpercaya sangat penting untuk memahami perubahan jumlah dan kondisi penduduk di wilayah Kota Mojokerto. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan profil ini dapat dikategorikan menjadi tiga bagian utama, yaitu data registrasi, data non registrasi, dan data dari lintas sektoral, yang akan dijelaskan pada bagian berikut.

### 3.1 Registrasi

Registrasi merupakan pencatatan secara terus-menerus yang dilakukan terhadap penduduk di suatu wilayah administrasi. Beberapa data yang menjadi bagian dari registrasi penduduk mencakup data kelahiran, kematian, migrasi penduduk (perpindahan tempat tinggal), perkawinan, dan perceraian. Sumber data dalam kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto diperoleh dari data registrasi penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

### 3.2 Non Registrasi

Data non registrasi merupakan data bukan hasil registrasi yang menunjang data kependudukan. Sumber data non registrasi bersumber dari hasil sensus dan survei penduduk. Sensus mencatat dan mempublikasikan data demografis seluruh penduduk di suatu wilayah, sedangkan survei dilakukan pada sampel penduduk yang mewakili karakteristik masyarakat di daerah tersebut.





Terkait dengan penyusunan buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto, sumber data Non Registrasi yang digunakan adalah data hasil survei dan catatan pelayanan administrasi dari instansi pemerintah dan swasta selain data dari Perangkat Daerah Kota Mojokerto. Adapun sumber data non registrasi tersebut adalah Pemerintah Daerah Kota Mojokerto, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mojokerto, dan data dari literatur, data dari internet, serta sumber data lainnya.

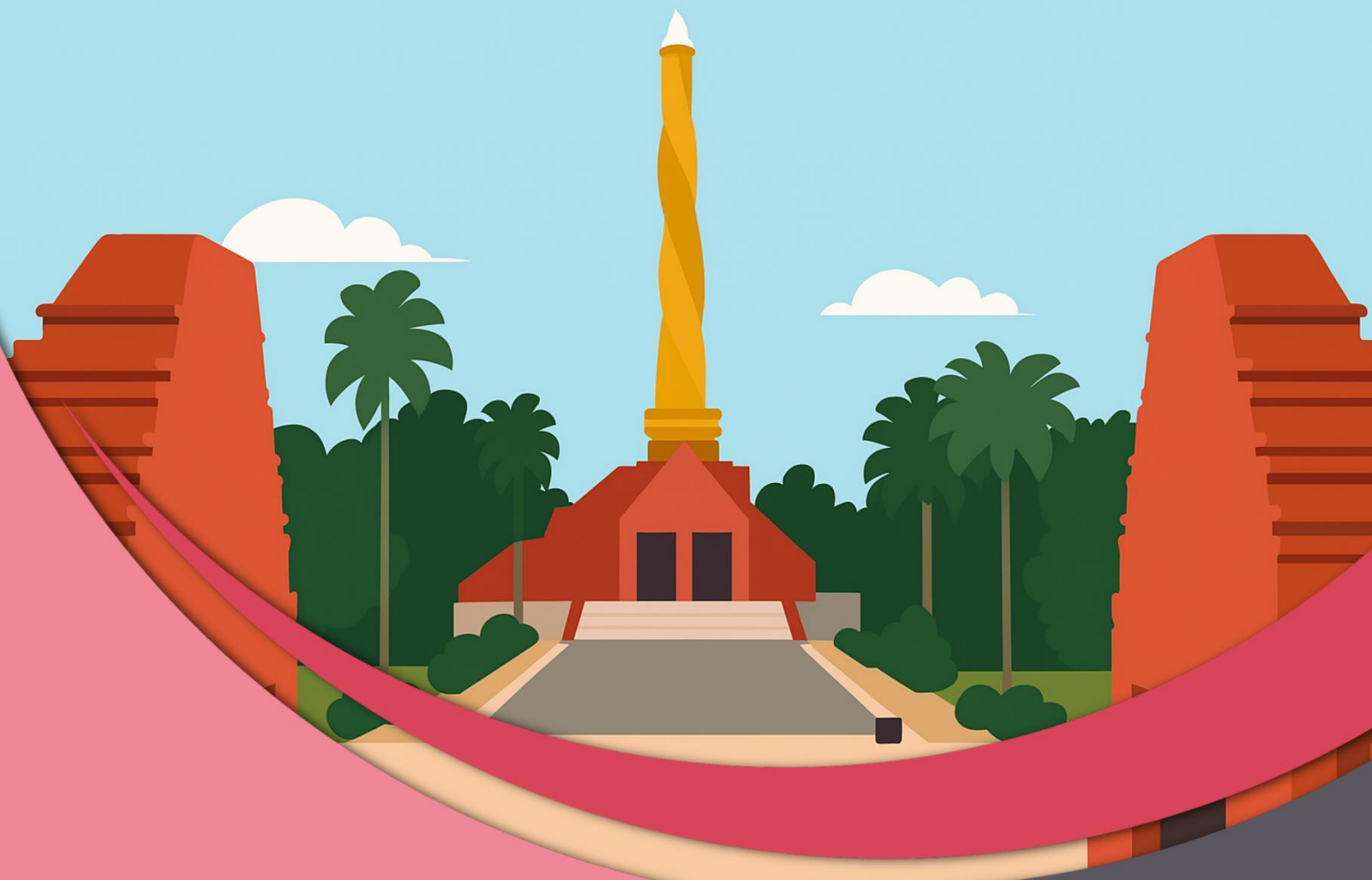
### 3.3 Data dari Lintas Sektoral

Data dari lintas sektor merupakan data yang diperoleh dari sektor lain yang menangani bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial dan lain sebagainya. Data dari lintas sektor ini dipergunakan sebagai data pendukung dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan. Data yang dimaksud berasal dari instansi terkait di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Mojokerto, selain Data Konsolidasi Bersih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sumber data tersebut antara lain dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta sumber data perangkat daerah lainnya. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperkaya dan memperkuat informasi tentang situasi dan berbagai aspek yang berkaitan dengan kependudukan.



# BAB IV

## PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN





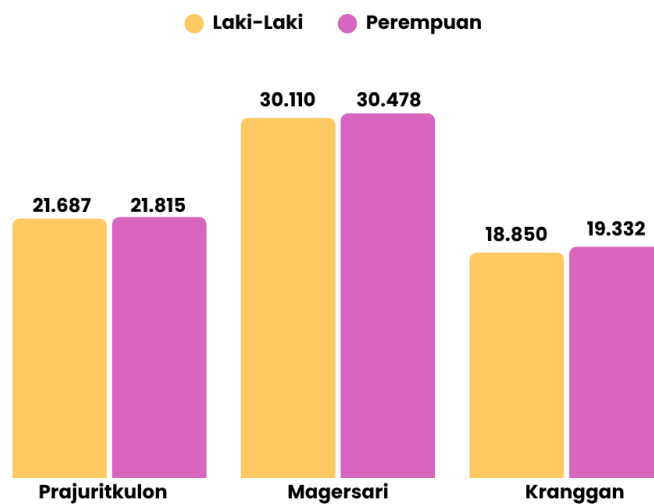
## BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

### 4.1 Kuantitas Penduduk

#### 4.1.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

##### A. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk merupakan banyaknya individu manusia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Kota Mojokerto berdasarkan jenis kelamin dan kecamatan disajikan dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Kota Mojokerto menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2024

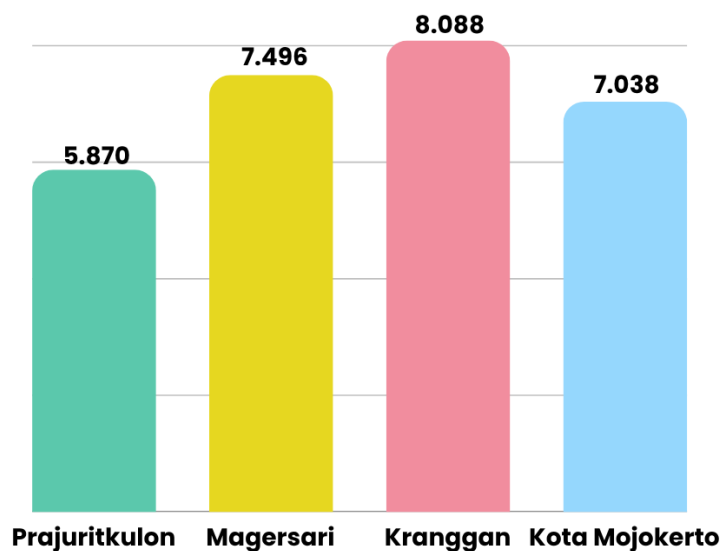
Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Kota Mojokerto tercatat sebanyak 142.272 jiwa dimana 70.647 jiwa adalah laki-laki dan 71.625 jiwa adalah perempuan. Jika dilihat berdasarkan kecamatannya, kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Magersari sebanyak 60.588 jiwa atau sebesar 42,59 persen dari total penduduk Kota Mojokerto.



Sementara, kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Kranggan sebanyak 38.182 jiwa atau sebesar 26,84 persen dari total seluruh penduduk Kota Mojokerto.

### B. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan dari jumlah penduduk (jiwa) dengan luas wilayah ( $\text{km}^2$ ) pada tahun tertentu. Kepadatan penduduk dapat menunjukkan apakah komposisi persebaran penduduk pada suatu wilayah merata atau tidak. Berikut ini data mengenai kepadatan penduduk di Kota Mojokerto pada tahun 2024.



Gambar 4.2 Kepadatan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2024 Semester II

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2024

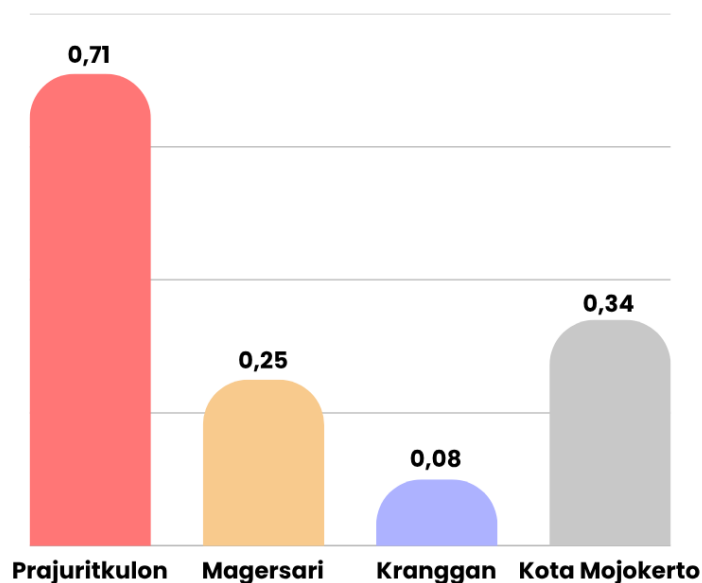
Kepadatan penduduk di Kota Mojokerto pada tahun 2024 tercatat sebesar 7.038 jiwa/ $\text{km}^2$ . Artinya, setiap wilayah seluas 1  $\text{km}^2$  dihuni oleh sekitar 7.038 jiwa penduduk. Ditinjau dari persebaran penduduk di setiap kecamatan, Kecamatan Kranggan merupakan kecamatan yang paling padat di wilayah Kota Mojokerto dengan kepadatan mencapai 8.088 jiwa/ $\text{km}^2$ .



Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan paling rendah adalah Kecamatan Prajuritkulon yakni sebesar 5.870 jiwa/km<sup>2</sup>.

### C. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator penting dalam menganalisis dinamika kependudukan di suatu wilayah. Pemantauan laju pertumbuhan penduduk diperlukan untuk memahami tren demografi yang dapat berdampak pada berbagai aspek pembangunan, seperti perencanaan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Mojokerto pada periode 2024 disajikan pada grafik sebagai berikut:



Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2023 dan Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2024

Laju pertumbuhan penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2024 sebesar 0,34 persen yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk dibandingkan tahun sebelumnya.



Berdasarkan kecamatan, pertumbuhan tertinggi terjadi di Kecamatan Prajuritkulon sebesar 0,71 persen, diikuti kecamatan Magersari sebesar 0,25 persen, dan yang terendah yaitu Kecamatan Kranggan yaitu sebesar 0,08 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh mobilitas penduduk, pengembangan permukiman, serta daya tarik ekonomi dan fasilitas publik.

#### 4.1.2 Penduduk menurut Karakteristik Demografi

##### A. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Informasi tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin, penting untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu. Selain itu, jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan dalam merencanakan pelayanan sosial dan ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai kelompok umur penduduk.

##### a) Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan di suatu wilayah pada waktu tertentu. Angka ini diperoleh dengan membagi jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan, lalu dikalikan 100. Hasilnya menunjukkan jumlah laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Berikut data rasio jenis kelamin Kota Mojokerto tahun 2024.





Tabel 4.1 Rasio Jenis Kelamin Kota Mojokerto Tahun 2024

No (1)	Kelompok Umur (2)	Jenis Kelamin		Jumlah (5)	Rasio Jenis Kelamin (6)=(3):(4)×100
		Laki-Laki (3)	Perempuan (4)		
1	0 - 4 Thn	4.552	4.294	8.846	106,01
2	5 - 9 Thn	5.452	5.201	10.653	104,83
3	10 - 14 Thn	5.957	5.856	11.813	101,72
4	15 - 19 Thn	5.847	5.774	11.621	101,26
5	20 - 24 Thn	5.831	5.453	11.284	106,93
6	25 - 29 Thn	5.403	5.265	10.668	102,62
7	30 - 34 Thn	5.242	5.193	10.435	100,94
8	35 - 39 Thn	5.269	5.154	10.423	102,23
9	40 - 44 Thn	5.858	5.811	11.669	100,81
10	45 - 49 Thn	5.194	5.040	10.234	103,06
11	50 - 54 Thn	4.518	4.653	9.171	97,10
12	55 - 59 Thn	3.881	4.178	8.059	92,89
13	60 - 64 Thn	2.899	3.555	6.454	81,55
14	65 - 69 Thn	2.329	2.742	5.071	84,94
15	70 - 74 Thn	1.366	1.612	2.978	84,74
16	≥ 75 Thn	1.049	1.844	2.893	56,89
Jumlah		70.647	71.625	142.272	98,63

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024

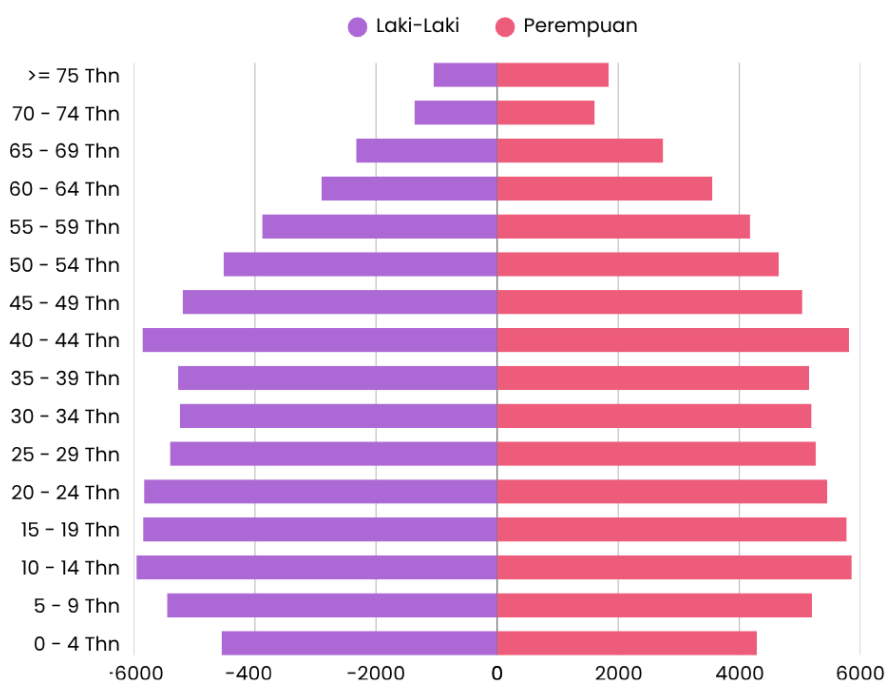
Rasio jenis kelamin di Kota Mojokerto sebesar 98,63 persen, menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, dengan selisih 978 jiwa. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, rasio jenis kelamin di kelompok usia 0-49 tahun cenderung lebih dari 100 persen, yang berarti jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun menurun pada usia 50 tahun ke atas kurang dari 100 persen, terutama lansia (≥75 tahun) dengan rasio 56,89 persen, mencerminkan angka harapan hidup perempuan yang lebih tinggi.





**b) Piramida Penduduk**

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan melalui piramida penduduk yang menunjukkan jumlah laki-laki dan perempuan per kelompok umur. Bentuk piramida mencerminkan kondisi demografi suatu wilayah yang dipengaruhi kelahiran, kematian, dan migrasi. Berikut grafik piramida penduduk Kota Mojokerto tahun 2024.



**Gambar 4.4** Piramida Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2024

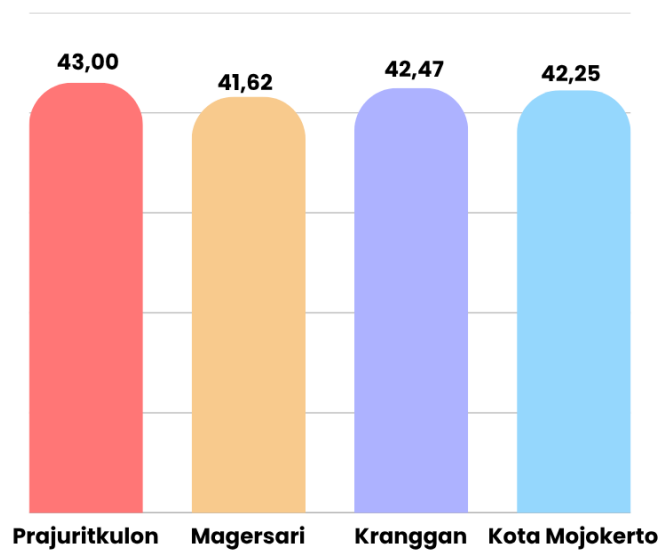
Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024

Piramida penduduk di Kota Mojokerto pada tahun 2024 menunjukkan karakteristik piramida stasioner, tetapi dengan kecenderungan menuju piramida konstruktif. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk relatif seimbang pada kelompok usia produktif (15-59 tahun) dan mulai menurun pada usia muda (0-14 tahun). Hal ini mencerminkan tingkat kelahiran yang menurun dan dominasi penduduk usia kerja. Selain itu, jumlah penduduk lanjut usia cukup besar, terutama perempuan, menandakan peningkatan harapan hidup dan awal transisi menuju masyarakat menua.



### c) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (<15 tahun dan >65 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Angka ini menggambarkan beban yang ditanggung penduduk produktif dalam mendukung penduduk yang tidak produktif. Semakin tinggi rasio, semakin besar beban yang harus ditanggung. Berikut data rasio ketergantungan Kota Mojokerto tahun 2024 dalam bentuk grafik.



Gambar 4.5 Rasio Ketergantungan Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024

Pada tahun 2024, rasio ketergantungan penduduk Kota Mojokerto sebesar 42,25 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 42 penduduk non-produktif. Rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Prajuritkulon yaitu sebesar 43,00 persen dan terendah di Kecamatan Magersari sebesar 41,62 persen. Secara umum, rasio ini masih tergolong baik karena mayoritas penduduk berada dalam usia produktif.



## B. Keluarga

Keluarga adalah sekelompok orang yang tinggal bersama dan memiliki hubungan kekerabatan melalui perkawinan, kelahiran, atau adopsi. Terdapat dua tipe keluarga: (a) Keluarga inti (*nuclear*), yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah; dan (b) Keluarga luas (*extended*), mencakup keluarga inti ditambah anggota lain seperti anak yang sudah menikah, cucu, orang tua, atau kerabat lain yang menjadi tanggungan.

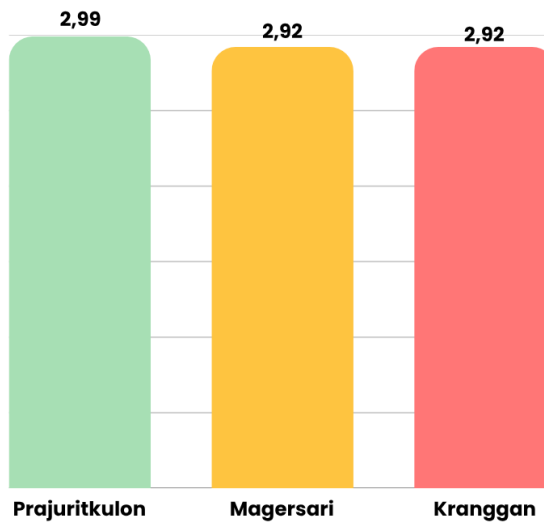
### a) Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Keluarga adalah kelompok orang yang tinggal dalam satu rumah dan memiliki hubungan kekerabatan melalui perkawinan, kelahiran, atau adopsi. Secara umum, keluarga terbagi menjadi dua jenis: keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Rata-rata anggota keluarga dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan jumlah keluarga di suatu wilayah. Berikut data jumlah keluarga dan rata-rata anggota keluarga di Kota Mojokerto tahun 2024 dalam bentuk grafik.

**Tabel 4.2** Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga di Kota Mojokerto Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah Penduduk	Rata-Rata Anggota Keluarga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4):(3)
1	Prajuritkulon	14.572	43.502	2,99
2	Magersari	20.727	60.588	2,92
3	Kranggan	13.074	38.182	2,92
Kota Mojokerto		48.373	142.272	2,94

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024



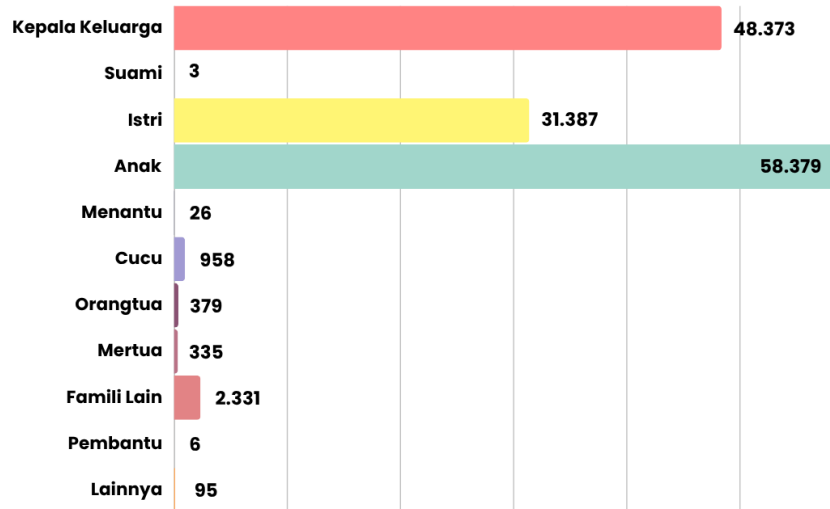
Gambar 4.6 Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga di Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024

Pada tahun 2024, jumlah keluarga di Kota Mojokerto tercatat sebanyak 48.373 keluarga. Kecamatan dengan jumlah keluarga terbanyak adalah Kecamatan Magersari yaitu sebanyak 20.727 keluarga, sedangkan kecamatan dengan jumlah keluarga paling sedikit adalah Kecamatan Kranggan sebanyak 13.074 keluarga. Rata-rata anggota keluarga sebesar 2,94 orang, dengan variasi antar kecamatan antara 2,92-2,99 orang, menunjukkan mayoritas keluarga terdiri dari 2 hingga 3 anggota.

#### b) Status Hubungan dengan Kepala Keluarga

Hubungan dengan kepala keluarga menunjukkan status tiap anggota dalam keluarga, seperti suami, istri, anak, orang tua, atau pihak lain yang tinggal bersama, misalnya pembantu. Data ini penting untuk memahami komposisi keluarga, pola tinggal, dan pola pengasuhan anak. Berikut grafik hubungan dengan kepala keluarga di Kota Mojokerto tahun 2024.



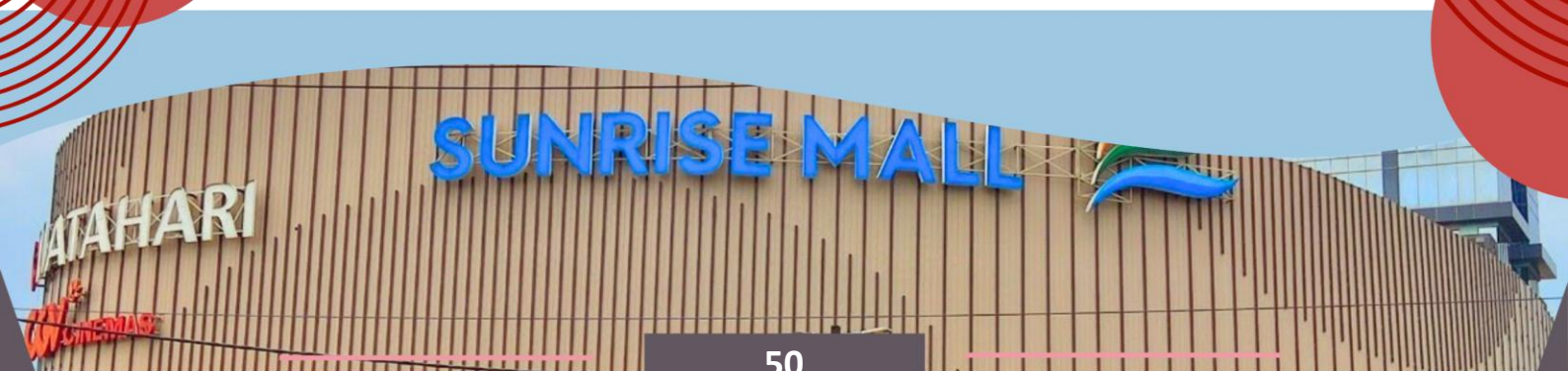
Gambar 4.7 Hubungan dengan Kepala Keluarga Kota Mojokerto Tahun 2024

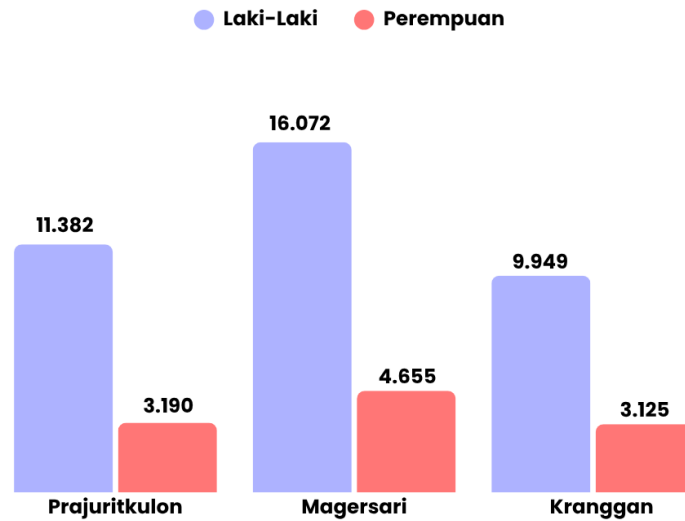
Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023

Pada tahun 2024, status hubungan dengan kepala keluarga di Kota Mojokerto mayoritas adalah sebagai anak yaitu sebanyak 58.379 jiwa atau sebanyak 41,03 persen. Kemudian, status sebagai kepala keluarga sebanyak 48.373 jiwa, selain itu, status sebagai istri sebanyak 31.387 jiwa.

### c) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Secara umum, laki-laki dianggap sebagai kepala dan penanggung jawab ekonomi keluarga. Namun, banyak perempuan juga menjadi kepala keluarga karena berbagai alasan seperti cerai atau ditinggal pasangan. Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin memberikan gambaran jumlah perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga serta kondisi sosial ekonominya. Berikut grafik data Kota Mojokerto tahun 2024.





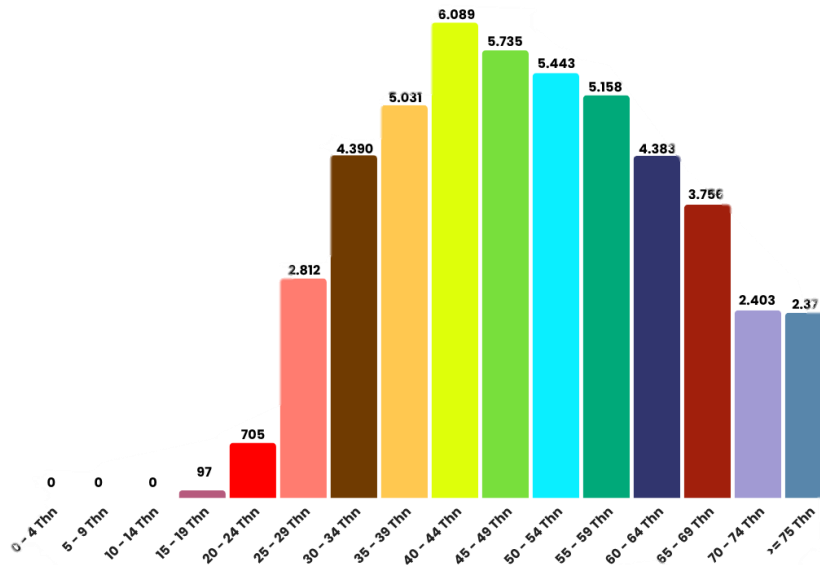
**Gambar 4.8** Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024

Pada tahun 2024, mayoritas kepala keluarga di Kota Mojokerto adalah laki-laki, yaitu 37.403 jiwa dari total 48.373 jiwa keluarga atau sebesar 77,34 persen, sementara kepala keluarga perempuan sebanyak 10.970 jiwa atau sebesar 22,66 persen. Jumlah terbanyak kepala keluarga laki-laki berada di Kecamatan Magersari yaitu sebanyak 16.072 jiwa, sedangkan kepala keluarga perempuan terbanyak di Kecamatan Magersari yaitu sebanyak 4.655 jiwa.

**d) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur**

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur penting untuk menganalisis kondisi demografi keluarga dan merumuskan kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Berikut data kepala keluarga menurut kelompok umur di Kota Mojokerto tahun 2024.

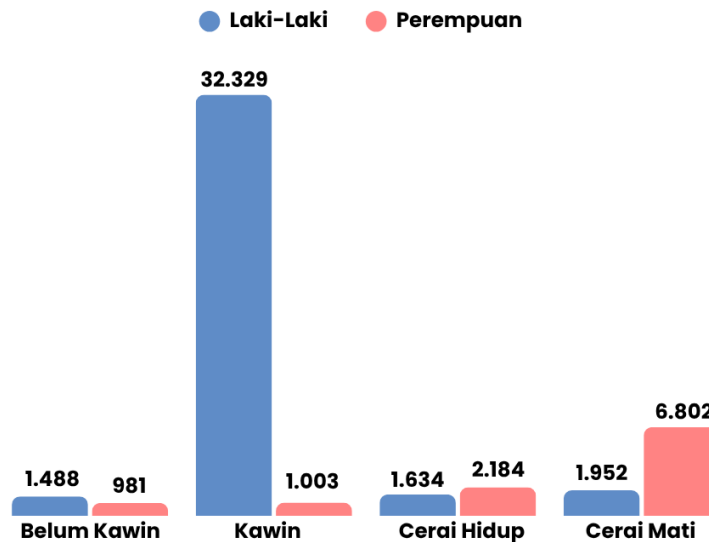


**Gambar 4.9** Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur Kota Mojokerto Tahun 2024  
 Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024

Pada tahun 2024, mayoritas kepala keluarga di Kota Mojokerto berada pada kelompok usia produktif (30-64 tahun) sebanyak 36.229 jiwa, dengan jumlah tertinggi pada usia 40-44 tahun (6.089 jiwa). Kepala keluarga usia 65 tahun ke atas juga cukup signifikan, yakni 8.530 jiwa, mencerminkan tingginya proporsi lansia. Sementara itu, tidak terdapat kepala keluarga pada kelompok usia 0-14 tahun.

**e) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin**

Dalam demografi, kepala keluarga adalah individu—laki-laki atau perempuan, menikah atau tidak—yang memegang peran utama dalam keluarga secara ekonomi, sosial, dan psikologis. Karakteristik kepala keluarga menurut status kawin menunjukkan jumlah keluarga yang dikepalai oleh individu lajang, menikah, atau cerai, dan mencerminkan dinamika sosial serta pola tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga. Data ini juga penting untuk perumusan kebijakan sosial dan ekonomi. Berikut data Kota Mojokerto tahun 2024.



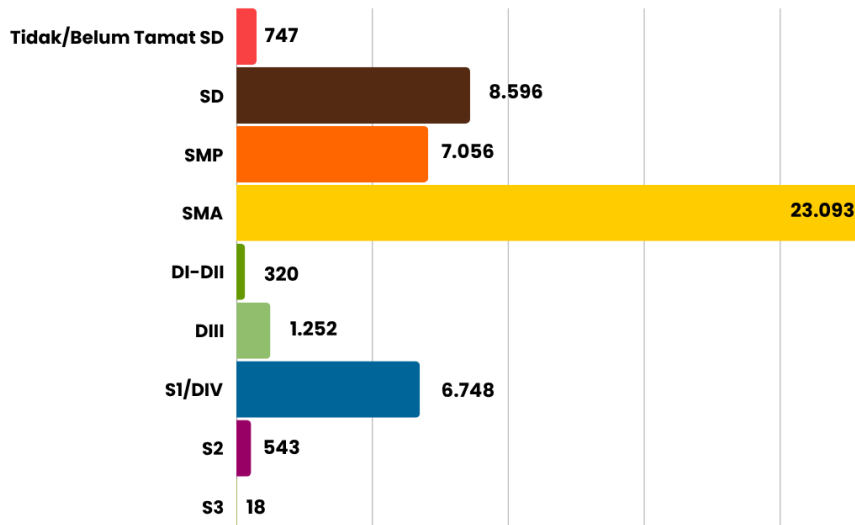
**Gambar 4.10** Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin di Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024

Pada tahun 2024, mayoritas kepala keluarga di Kota Mojokerto berstatus kawin sebanyak 33.332 jiwa atau sebesar 68,91 persen, sedangkan yang paling sedikit yaitu dengan status belum kawin 2.469 jiwa atau sebesar 5,10 persen. Kepala keluarga laki-laki didominasi oleh status kawin yaitu sebanyak 32.329 jiwa, sedangkan perempuan lebih banyak pada status cerai mati yaitu sebanyak 6.802 jiwa. Status belum kawin didominasi laki-laki sebanyak 1.488 jiwa dibanding perempuan sebanyak 981 jiwa.

#### f) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan kepala keluarga mencerminkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Semakin tinggi pendidikan, umumnya semakin besar peluang ekonomi dan status sosial. Data ini penting untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berikut karakteristik kepala keluarga menurut pendidikan di Kota Mojokerto tahun 2024.



Gambar 4.11 Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024

Pada tahun 2024, mayoritas kepala keluarga di Kota Mojokerto berpendidikan SMA sebanyak 23.093 jiwa, disusul SD sebanyak 8.596 jiwa. Sementara itu, kepala keluarga dengan latar belakang pendidikan S3 berjumlah paling sedikit yaitu 18 jiwa. Namun, di Kota Mojokerto masih terdapat 747 kepala keluarga yang tidak/belum sekolah. Tingginya jumlah kepala keluarga berpendidikan rendah berpotensi membatasi akses terhadap peluang ekonomi dan mendorong dominasi di sektor informal.

**g) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan**

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari jenis pekerjaan kepala keluarga dan kontribusinya terhadap penghasilan rumah tangga. Informasi ini penting untuk memahami struktur ketenagakerjaan dan sektor dominan di Kota Mojokerto, serta sebagai dasar perencanaan kebijakan kesejahteraan. Berikut data tahun 2024 dalam bentuk tabel.



Tabel 4.3 Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan di Kota Mojokerto

Tahun 2024

No	Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Belum/Tidak Bekerja	921	2,46	516	4,70	1.437	2,97
2	Mengurus Rumah Tangga	3	0,01	5.996	54,66	5.999	12,40
3	Pelajar/Mahasiswa	150	0,40	116	1,06	266	0,55
4	Pensiunan	1.308	3,50	521	4,75	1.829	3,78
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.112	2,97	198	1,80	1.310	2,71
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	426	1,14	0	0,00	426	0,88
7	Kepolisian RI (POLRI)	321	0,86	4	0,04	325	0,67
8	Perdagangan	147	0,39	61	0,56	208	0,43
9	Petani/Pekebun	187	0,50	44	0,40	231	0,48
10	Peternak	8	0,02	1	0,01	9	0,02
11	Nelayan/Perikanan	1	0,00	0	0,00	1	0,00
12	Industri	66	0,18	2	0,02	68	0,14
13	Konstruksi	32	0,09	0	0,00	32	0,07
14	Transportasi	201	0,54	1	0,01	202	0,42
15	Karyawan Swasta	20.780	55,56	1.512	13,78	22.292	46,08
16	Karyawan BUMN	267	0,71	12	0,11	279	0,58
17	Karyawan BUMD	27	0,07	3	0,03	30	0,06
18	Karyawan Honorar	119	0,32	16	0,15	135	0,28
19	Buruh Harian Lepas	497	1,33	43	0,39	540	1,12
20	Buruh Tani/Perkebunan	87	0,23	15	0,14	102	0,21
21	Buruh Nelayan/Perikanan	1	0,00	0	0,00	1	0,00
22	Buruh Peternakan	2	0,01	0	0,00	2	0,00
23	Pembantu Rumah Tangga	0	0,00	63	0,57	63	0,13
24	Tukang Cukur	14	0,04	0	0,00	14	0,03
25	Tukang Listrik	12	0,03	0	0,00	12	0,02
26	Tukang Batu	337	0,90	0	0,00	337	0,70
27	Tukang Kayu	71	0,19	0	0,00	71	0,15



No	Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
28	Tukang Sol Sepatu	226	0,60	0	0,00	226	0,47
29	Tukang Las/Pandai Besi	28	0,07	0	0,00	28	0,06
30	Tukang Jahit	68	0,18	28	0,26	96	0,20
31	Tukang Gigi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32	Penata Rias	0	0,00	5	0,05	5	0,01
33	Penata Busana	0	0,00	1	0,01	1	0,00
34	Penata Rambut	2	0,01	0	0,00	2	0,00
35	Mekanik	49	0,13	0	0,00	49	0,10
36	Seniman	13	0,03	2	0,02	15	0,03
37	Tabib	2	0,01	0	0,00	2	0,00
38	Paraji	2	0,01	0	0,00	2	0,00
39	Perancang Busana	1	0,00	2	0,02	3	0,01
40	Penerjemah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
41	Imam Masjid	2	0,01	0	0,00	2	0,00
42	Pendeta	29	0,08	1	0,01	30	0,06
43	Pastor	3	0,01	0	0,00	3	0,01
44	Wartawan	12	0,03	1	0,01	13	0,03
45	Ustadz/Mubaligh	7	0,02	1	0,01	8	0,02
46	Juru Masak	0	0,00	0	0,03	0	0,02
47	Promotor Acara	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48	Anggota DPR RI	0	0,00	1	0,01	1	0,00
49	Anggota DPD RI	0	0,00	0	0,00	0	0,00
50	Anggota BPK	0	0,00	0	0,00	0	0,00
51	Presiden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
52	Wakil Presiden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
54	Anggota Kabinet Kementerian	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55	Duta Besar	0	0,00	0	0,00	0	0,00
56	Gubernur	0	0,00	0	0,00	0	0,00
57	Wakil Gubernur	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58	Bupati	0	0,00	0	0,00	0	0,00
59	Wakil Bupati	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60	Walikota	0	0,00	1	0,01	1	0,00



No	Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
61	Wakil Walikota	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62	Anggota DPRD Prop.	1	0,00	0	0,00	1	0,00
63	Anggota DPRD Kab./Kota	6	0,02	2	0,02	8	0,02
64	Dosen	79	0,21	10	0,09	89	0,29
65	Guru	372	0,99	148	1,35	520	1,07
66	Pilot	1	0,00	0	0,00	1	0,00
67	Pengacara	9	0,02	1	0,01	10	0,02
68	Notaris	2	0,01	0	0,00	2	0,00
69	Arsitek	4	0,01	0	0,00	4	0,01
70	Akuntan	1	0,00	0	0,00	1	0,00
71	Konsultan	5	0,01	0	0,01	5	0,01
72	Dokter	65	0,17	20	0,18	85	0,18
73	Bidan	0	0,00	14	0,13	14	0,03
74	Perawat	45	0,12	15	0,14	60	0,12
75	Apoteker	3	0,01	2	0,02	5	0,01
76	Psikiater/Psikolog	0	0,00	0	0,00	0	0,00
77	Penyiar Televisi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78	Penyiar Radio	1	0,00	0	0,00	1	0,00
79	Pelaut	14	0,04	0	0,00	14	0,03
80	Peneliti	0	0,00	0	0,00	0	0,00
81	Sopir	284	0,76	0	0,00	284	0,59
82	Pialang	0	0,00	0	0,00	0	0,00
83	Paranormal	1	0,00	0	0,00	1	0,00
84	Pedagang	1.156	3,09	454	4,14	1.610	3,33
85	Perangkat Desa	1	0,00	0	0,00	1	0,00
86	Kepala Desa	0	0,00	0	0,00	0	0,00
87	Biarawan/ Biarawati	0	0,00	3	0,03	3	0,01
88	Wiraswasta	7.708	20,61	1.093	9,96	8.801	18,19
89	Anggota Lemb. Tinggi Lainnya	98	0,26	41	0,37	139	0,29
90	Artis	1	0,00	0	0,00	1	0,00
91	Atlit	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92	Chef	0	0,00	0	0,00	0	0,00
93	Manajer	0	0,00	0	0,00	0	0,00



No	Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
94	Tenaga Tata Usaha	0	0,00	0	0,00	0	0,00
95	Operator	0	0,00	0	0,00	0	0,00
96	Pekerja Pengolahan Kerajinan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
97	Teknisi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
98	Asisten Ahli	0	0,00	0	0,00	0	0,00
99	Pekerjaan Lainnya	5	0,01	0	0,00	5	0,01
Kota Mojokerto		37.403	100,00	10.970	100,00	48.373	100,00

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024

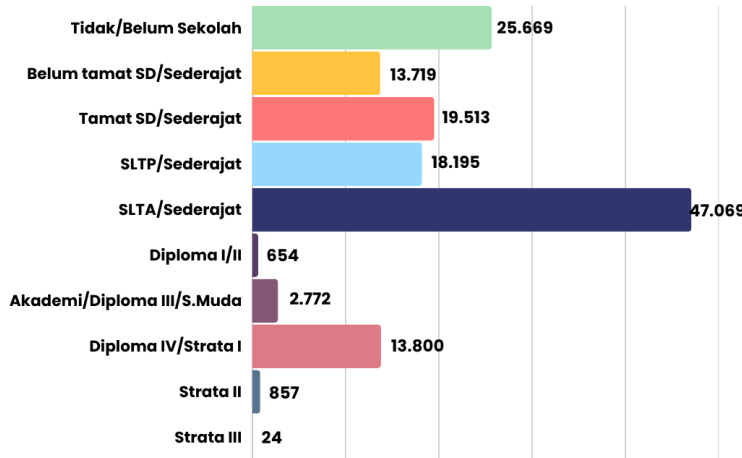
Mayoritas kepala keluarga di Kota Mojokerto bekerja sebagai karyawan swasta, yaitu sebanyak 22.292 jiwa (46,08 persen). Selanjutnya, sebanyak 8.801 jiwa (18,19 persen) berwiraswasta. Selain itu, terdapat 5.996 kepala keluarga perempuan yang mengurus rumah tangga.

### C. Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

Bagian ini akan mengulas karakteristik sosial penduduk Kota Mojokerto, yang meliputi aspek pendidikan, agama, dan disabilitas. Memahami karakteristik sosial penduduk sangat penting untuk menyelaraskan kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam mengelola masyarakatnya. Setiap daerah memiliki ciri khas penduduk yang unik, berbeda dengan daerah lainnya.

#### a) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan menjadi faktor penting dalam menilai kualitas dan daya saing penduduk. Analisis tingkat pendidikan Kota Mojokerto tahun 2024 diperlukan untuk memahami kondisi SDM dan merumuskan strategi peningkatannya. Berikut data tahun 2024 dalam bentuk grafik.



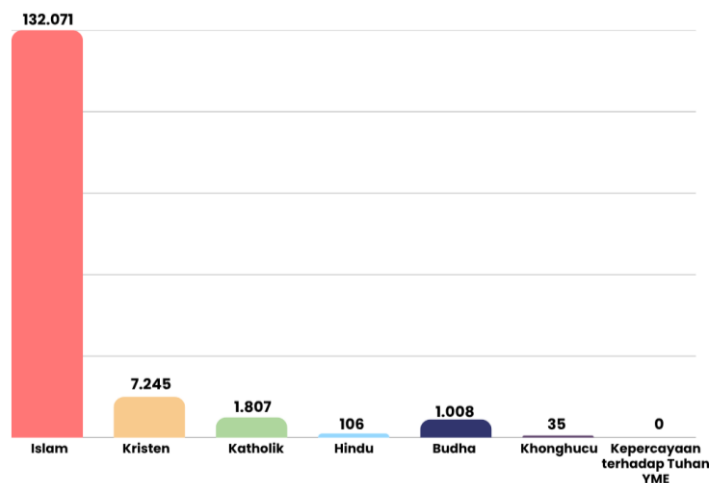
Gambar 4.12 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024

Pada tahun 2024, mayoritas penduduk Kota Mojokerto berpendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 47.069 jiwa, diikuti oleh penduduk tidak/belum sekolah sebanyak 25.669 jiwa (18,04 persen).

**b) Jumlah Penduduk Menurut Agama**

Bagian ini menyajikan jumlah penduduk menurut agama per kecamatan di Kota Mojokerto tahun 2024, sebagai dasar perencanaan sarana keagamaan dan program kerukunan antar umat beragama.



Gambar 4.13 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama di Kota Mojokerto Tahun 2024

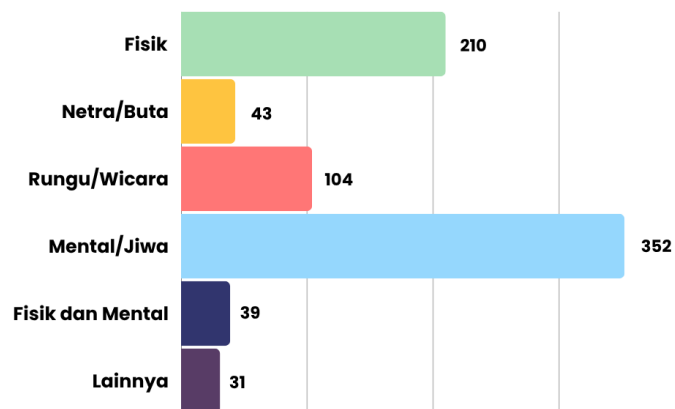
Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024



Pada tahun 2024, mayoritas penduduk Kota Mojokerto beragama Islam sebanyak 132.071 jiwa (92,83% persen), sedangkan pemeluk Hindu, Budha, dan Konghucu tercatat dalam jumlah kecil. Serta tidak terdapat penduduk yang memeluk Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

### c) Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah individu dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik jangka panjang, namun memiliki hak dan kedudukan hukum yang setara. Berikut data penduduk penyandang disabilitas di Kota Mojokerto tahun 2024.



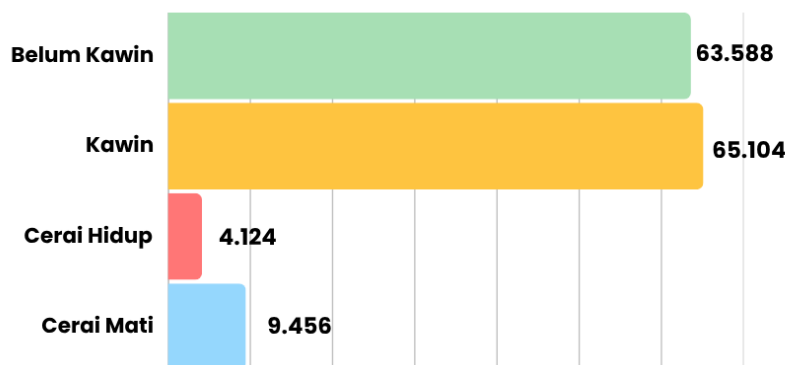
Gambar 4.14 Jumlah Penduduk berdasarkan Disabilitas di Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024

Pada tahun 2024, mayoritas penyandang disabilitas di Kota Mojokerto adalah disabilitas mental/jiwa sebanyak 352 jiwa (45,19 persen), disusul disabilitas fisik 210 jiwa (26,96 persen) dan disabilitas lain sebanyak 31 jiwa (3,98 persen).

### d) Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin

Status perkawinan mencerminkan struktur sosial dan dinamika penduduk, penting untuk melihat kondisi kesejahteraan, ketenagakerjaan, serta kebijakan kependudukan. Berikut data Kota Mojokerto tahun 2024.



**Gambar 4.15** Jumlah Penduduk berdasarkan Status Kawin di Kota Mojokerto Tahun 2024  
Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024

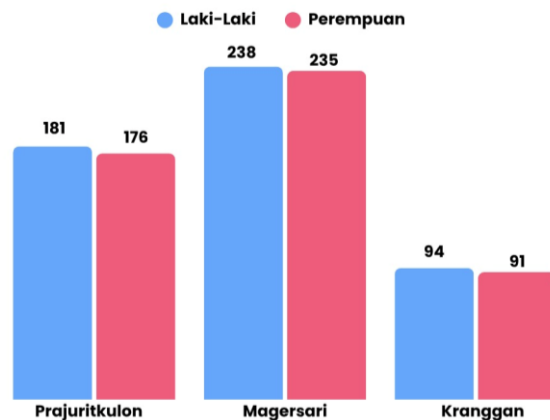
Berdasarkan data di atas, penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2024 mayoritas berstatus kawin, yaitu sebanyak 65.104 jiwa atau 45,76 persen dari total penduduk. Sementara itu, status perkawinan penduduk Kota Mojokerto paling sedikit sebanyak 4.124 jiwa (2,90 persen) berstatus cerai hidup.

#### D. Kelahiran

Kelahiran merupakan faktor utama pertumbuhan penduduk yang berdampak pada kebutuhan gizi, layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Tingkat kelahiran juga dipengaruhi pola fertilitas masa lalu. Pemahaman terhadap faktor kelahiran, termasuk program keluarga berencana, penting untuk perumusan kebijakan sosial dan penguatan kesejahteraan keluarga.

##### a) Jumlah Kelahiran

Jumlah kelahiran adalah banyaknya kelahiran hidup dalam periode dan wilayah tertentu. Data ini penting untuk perencanaan fasilitas, khususnya layanan kesehatan ibu dan anak, serta sebagai dasar perhitungan indikator fertilitas. Berikut data kelahiran di Kota Mojokerto tahun 2024.



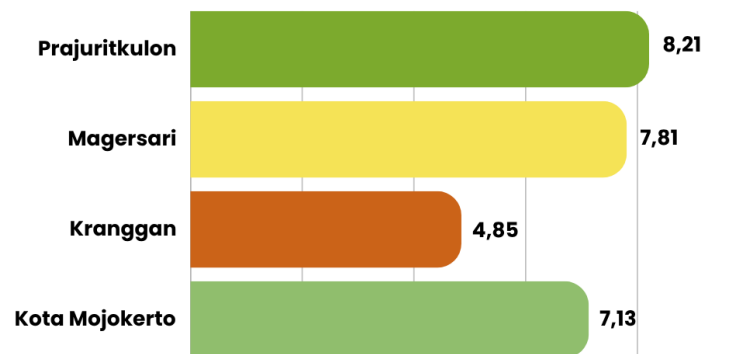
Gambar 4.16 Jumlah Kelahiran di Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto

Pada tahun 2024, jumlah kelahiran di Kota Mojokerto tercatat sebanyak 1.015 bayi, terdiri dari 513 bayi laki-laki dan 502 bayi perempuan. Kecamatan dengan jumlah kelahiran tertinggi terjadi di Kecamatan Magersari sebanyak 473 bayi. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah kelahiran bayi paling rendah yaitu Kecamatan Kranggan tercatat sebanyak 185 bayi.

#### b) Angka Kelahiran Kasar

Angka kelahiran kasar (*Crude Birth Rate/CBR*) menunjukkan jumlah kelahiran hidup per 1.000 penduduk dalam satu tahun. Meskipun mudah dihitung, indikator ini masih bersifat umum karena tidak memperhitungkan kelompok yang tidak berisiko melahirkan. Berikut CBR Kota Mojokerto tahun 2024.



Gambar 4.17 Angka Kelahiran Kasar di Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto

Angka kelahiran kasar di Kota Mojokerto pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,13, yang berarti terdapat sekitar 7 kelahiran per 1.000 penduduk. Kecamatan dengan angka kelahiran kasar tertinggi adalah Kecamatan Prajuritkulon dengan angka 8,21 kelahiran per 1.000 penduduk, sedangkan angka kelahiran kasar paling rendah adalah Kecamatan Kranggan sebesar 4,85 kelahiran per 1.000 penduduk.

## E. Kematian

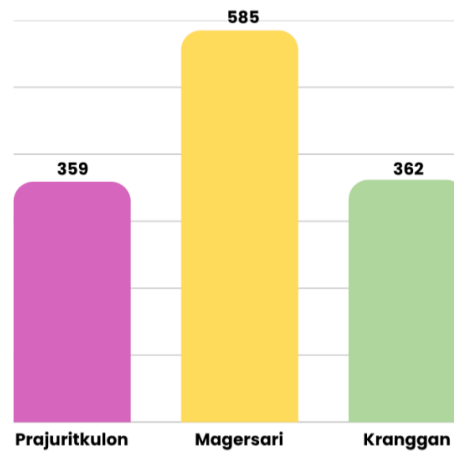
Kematian atau mortalitas menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) adalah suatu peristiwa hilangnya semua tanda kehidupan secara permanen yang dapat terjadi setelah kelahiran hidup. Kematian atau mortalitas merupakan salah satu komponen demografi selain fertilitas dan migrasi yang memengaruhi jumlah, struktur dan komposisi penduduk. Pengaruh kematian adalah mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah.

### a) Jumlah Kematian

Jumlah kematian mencerminkan tingkat kejadian kematian di suatu wilayah dalam periode tertentu. Data ini berperan penting dalam menilai efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan



kesejahteraan masyarakat. Berikut data kematian di Kota Mojokerto tahun 2024.



Gambar 4.18 Jumlah Kematian di Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, jumlah kematian yang tercatat di Kota Mojokerto mencapai 1.306 jiwa. Kecamatan Magersari mencatat jumlah tertinggi dengan 585 jiwa, disusul Kecamatan Kranggan sebanyak 362 jiwa, dan Kecamatan Prajuritkulon sebanyak 359 jiwa.

**b) Angka Kematian Kasar**

Angka kematian kasar (*Crude Death Rate/CDR*) merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian selama setahun untuk setiap 1.000 penduduk. Parameter ini dikatakan kasar karena jumlah pembaginya adalah total penduduk seluruhnya pada pertengahan tahun. Berikut Angka Kelahiran Kasar Kota Mojokerto tahun 2024.





Gambar 4.19 Angka Kematian Kasar di Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024

Angka kematian kasar di Kota Mojokerto pada tahun 2024 tercatat sebesar 9,18, yang berarti terdapat sekitar 9 kematian per 1.000 penduduk. Kecamatan dengan angka kematian kasar tertinggi adalah Kecamatan Magersari dengan angka 9,66 kematian per 1.000 penduduk, sedangkan angka kematian kasar paling rendah adalah Kecamatan Prajuritkulon sebesar 8,25 kematian per 1.000 penduduk.

## 4.2 Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk berperan penting dalam daya saing dan kemajuan daerah, ditentukan oleh pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Semakin tinggi kualitasnya, semakin besar peluang meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, pemetaan indikator kualitas penduduk penting untuk perencanaan pembangunan SDM yang produktif dan kompetitif.

### 4.2.1 Kesehatan

Kesehatan adalah aspek penting dalam menentukan kualitas penduduk, karena memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan. Indikator seperti akses layanan kesehatan, status gizi, harapan hidup, dan prevalensi penyakit membantu menilai derajat kesehatan. Data ini penting untuk merancang kebijakan yang mendukung kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan.

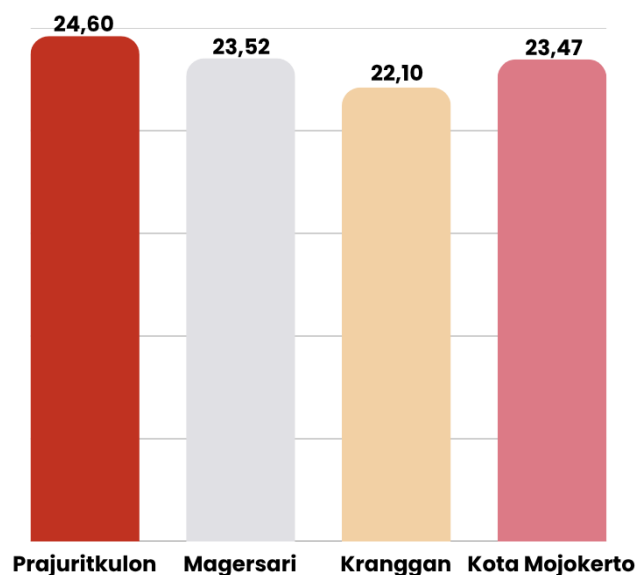


### A. Kelahiran

Kelahiran hidup adalah keluarnya bayi dari rahim ibu, tanpa memandang usia kehamilan, yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti bernapas, detak jantung, denyut tali pusat, atau gerakan otot, baik tali pusat sudah terpotong maupun belum.

#### a) Rasio Anak dan Perempuan

Rasio anak dan perempuan membandingkan jumlah balita dengan perempuan usia 15-49 tahun dalam suatu wilayah. Rasio ini digunakan sebagai indikator alternatif tingkat fertilitas saat data kelahiran tidak tersedia. Berikut data Kota Mojokerto tahun 2024 dalam grafik.



**Gambar 4.20** Rasio Anak dan Perempuan di Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024

Rasio anak dan perempuan di Kota Mojokerto pada tahun 2024 adalah sebesar 23,47, yang berarti terdapat sekitar 23-24 anak berusia di bawah 5 tahun untuk setiap 100 penduduk perempuan yang berusia 15 hingga 49 tahun. Kecamatan dengan rasio anak dan perempuan tertinggi berada di Kecamatan Prajuritkulon yaitu sebesar 24,60, atau sekitar 24-25 anak untuk setiap 100 penduduk perempuan yang berusia 15 hingga 49 tahun di



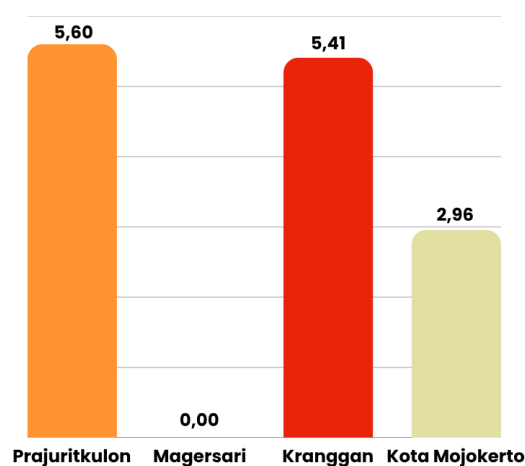
Kecamatan Prajuritkulon. Sementara itu, rasio anak dan perempuan terendah berada di Kecamatan Kranggan sebesar 22,10, yang berarti terdapat sekitar 22 anak untuk setiap 100 penduduk perempuan yang berusia 15 hingga 49 tahun di Kecamatan Kranggan.

## B. Kematian

Kematian memengaruhi pertumbuhan penduduk dan mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat. Indikator kematian penting untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan. Indikator yang digunakan antara lain angka kematian kasar, kematian bayi, dan kematian balita.

### a) Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi adalah jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dalam setahun. Angka kematian bayi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan masyarakat, khususnya dalam melihat efektivitas layanan kesehatan ibu dan anak serta pencapaian pembangunan di suatu daerah. Adapun angka kematian bayi di Kota Mojokerto pada tahun 2024 disajikan dalam grafik berikut:



Gambar 4.21 Angka Kematian Bayi di Kota Mojokerto Tahun 2024

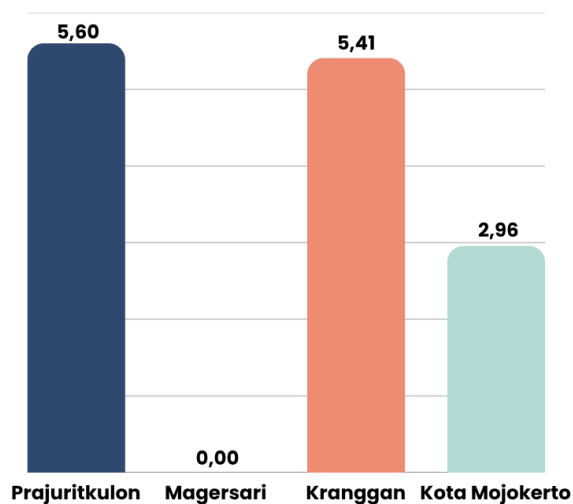
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto



Pada tahun 2024, angka kematian bayi di Kota Mojokerto tercatat sebesar 2,96, yang berarti terdapat sekitar 2-3 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Kecamatan dengan angka kematian bayi paling tinggi adalah Kecamatan Prajuritkulon dengan angka 5,60, yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 5-6 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup di Kecamatan Prajuritkulon. Sementara itu, angka kematian bayi di Kecamatan Magersari bernilai 0,00, yang berarti tidak terdapat kematian bayi di Kecamatan Magersari.

#### b) Angka Kematian Bayi Neonatal

Angka kematian neonatal adalah jumlah kematian bayi usia 0-28 hari per 1.000 kelahiran hidup dalam setahun. Umumnya disebabkan oleh faktor sejak lahir atau selama kehamilan, dan menjadi indikator kualitas layanan kesehatan ibu dan anak. Berikut data Kota Mojokerto.



Gambar 4.22 Angka Kematian Bayi Neonatal di Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto

Pada tahun 2024, angka kematian bayi neonatal di Kota Mojokerto mencapai 2,96, yang mengindikasikan adanya sekitar 2 hingga 3 kematian



bayi berusia 0-28 hari dari setiap 1.000 kelahiran hidup. Kecamatan dengan angka kematian bayi neonatal tertinggi adalah Kecamatan Prajuritkulon dengan angka 5,60, menunjukkan bahwa dari setiap 1.000 kelahiran hidup, sekitar 6 bayi neonatal meninggal. Sedangkan angka kematian bayi neonatal di Kecamatan Magersari bernilai 0,00, yang berarti tidak terdapat kematian bayi di Kecamatan Magersari.

### c) Angka Kematian Bayi Post-Neonatal

Angka kematian post-neonatal adalah jumlah kematian bayi usia 29 hari hingga 11 bulan per 1.000 kelahiran hidup. Indikator ini mencerminkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak serta efektivitas program kesehatan. Berikut data Kota Mojokerto tahun 2024.

**Tabel 4.4** Angka Kematian Bayi Post-Neonatal di Kota Mojokerto Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi Post-Neonatal (29 Hari-11 Bulan)		Jumlah Kelahiran		Angka Kematian Bayi Post-Neonatal (29 Hari-11 Bulan)
		Σ	%	Σ	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3):(5)×1.000
1	Prajuritkulon	0	0,00	357	35,17	0,00
2	Magersari	0	0,00	473	46,60	0,00
3	Kranggan	0	0,00	185	18,23	0,00
Kota Mojokerto		0	0,00	1.015	100,00	0,00

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto

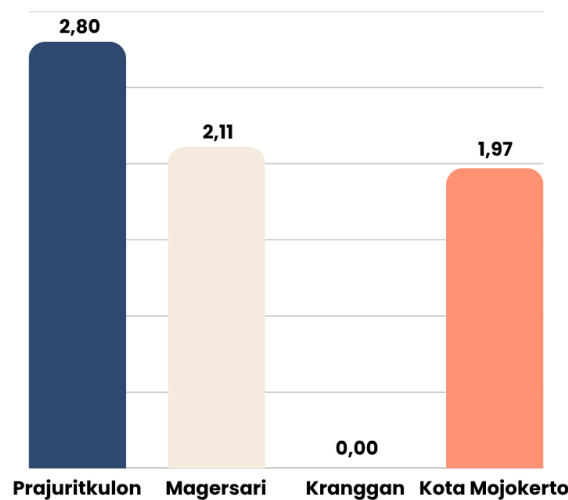
Pada tahun 2024, angka kematian bayi post-neonatal (usia 29 hari-11 bulan) di Kota Mojokerto tercatat sebesar 0,00 per 1.000 kelahiran hidup. Artinya, tidak ditemukan kasus kematian bayi pada rentang usia tersebut di seluruh kecamatan, yaitu Prajuritkulon, Magersari, dan Kranggan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa penanganan kesehatan bayi pada fase post-neonatal di



Kota Mojokerto cukup baik, meskipun tetap perlu memastikan pemantauan kesehatan secara berkelanjutan untuk menjaga capaian ini.

#### d) Angka Kematian Anak

Angka kematian anak (*Child Mortality Rate/CMR*) menunjukkan jumlah kematian anak usia 12-59 bulan per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, serta risiko penyakit menular atau kecelakaan. Berikut data CMR Kota Mojokerto tahun 2024:



Gambar 4.23 Angka Kematian Anak di Kota Mojokerto Tahun 2024

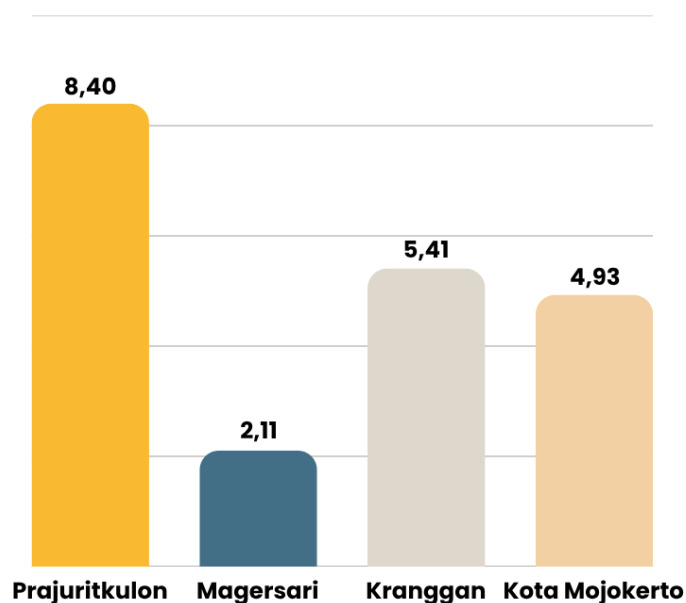
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto

Pada tahun 2024, angka kematian anak di Kota Mojokerto tercatat sebesar 1,97, yang berarti terdapat sekitar 2 kematian anak berusia 12 hingga 59 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup. Kecamatan dengan angka kematian anak tertinggi adalah Kecamatan Prajuritkulon, dengan angka 2,80. Sementara itu, di Kecamatan Magersari angka kematian anak sebesar 2,11, sedangkan untuk Kecamatan Kranggan tidak tercatat adanya kematian anak usia 1 hingga 4 tahun sepanjang tahun 2024.



### e) Angka Kematian Balita

Angka kematian balita mencerminkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya layanan ibu dan anak. Indikator ini mencakup kematian anak sejak lahir hingga usia lima tahun, dan dipengaruhi oleh kesehatan ibu, proses persalinan, gizi, akses layanan kesehatan, serta lingkungan. Data ini digunakan untuk menilai keberhasilan program kesehatan anak. Berikut angka kematian balita di Kota Mojokerto tahun 2024.



Gambar 4.24 Angka Kematian Balita di Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto

Pada tahun 2024, angka kematian balita di Kota Mojokerto tercatat sebesar 4,93, yang berarti terdapat sekitar 5 kematian balita (usia 0-59 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Kecamatan dengan angka kematian balita tertinggi adalah Kecamatan Prajuritkulon dengan angka 8,40. Sementara itu, Kecamatan dengan angka kematian balita terendah adalah Kecamatan Magersari sebesar 2,11.

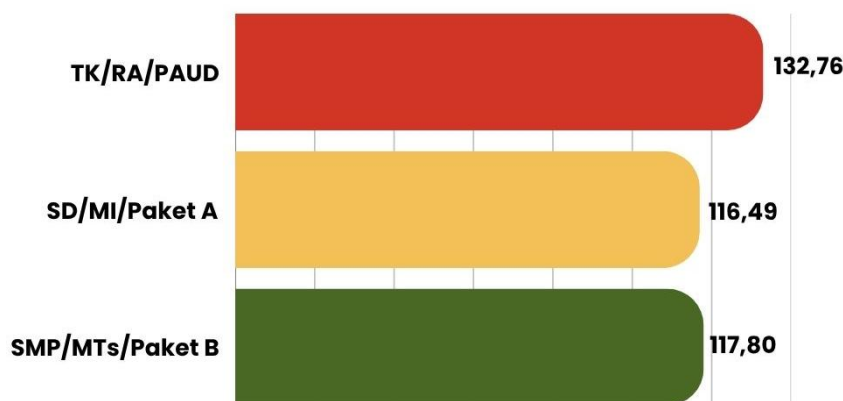


#### 4.2.2 Pendidikan

Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas penduduk dan pembangunan daerah. Tingkat pendidikan mencerminkan akses dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ilmu. Indikator pendidikan digunakan untuk melihat perkembangan pendidikan dan merumuskan kebijakan peningkatan kualitas SDM.

##### A. Angka Partisipasi Kasar

Pendidikan berperan penting dalam peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan daerah. Tingkat pendidikan mencerminkan akses dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ilmu. Indikator seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan perkembangan pendidikan dan menjadi dasar kebijakan peningkatan SDM. Berikut APK Kota Mojokerto tahun 2024.



**Gambar 4.25** Angka Partisipasi Kasar di Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mojokerto

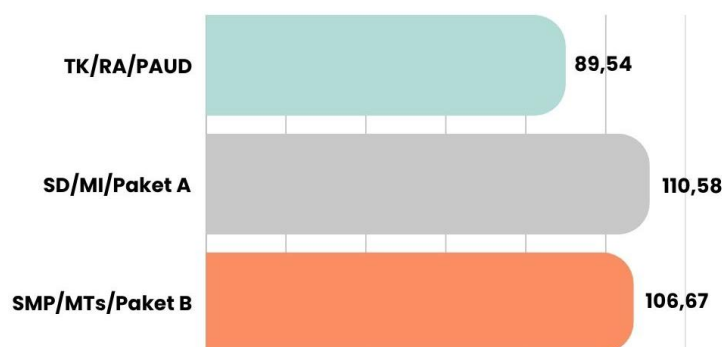
Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di Kota Mojokerto menunjukkan bahwa jumlah siswa yang bersekolah di setiap jenjang lebih banyak dibandingkan jumlah anak usia sekolah pada jenjang tersebut. Pada jenjang TK/RA/PAUD, APK mencapai 132,76, yang berarti jumlah anak yang bersekolah di tingkat ini melebihi jumlah anak usia dini di Kota Mojokerto.



Hal serupa terjadi pada jenjang SD/MI/Paket A dengan APK sebesar 116,49, yang menunjukkan bahwa lebih banyak anak yang terdaftar di tingkat ini dibandingkan jumlah anak usia sekolah dasar. Sementara itu, pada jenjang SMP/MTs/Paket B, APK tercatat sebesar 117,80, yang juga menggambarkan tingginya partisipasi siswa di jenjang pendidikan menengah pertama.

### B. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan persentase penduduk usia 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun yang bersekolah tepat waktu di jenjang SD, SLTP, dan SLTA. APM mencerminkan akses dan partisipasi pendidikan sesuai usia. Berikut data APM Kota Mojokerto tahun 2024:



Gambar 4.26 Angka Partisipasi Murni di Kota Mojokerto Tahun 2024

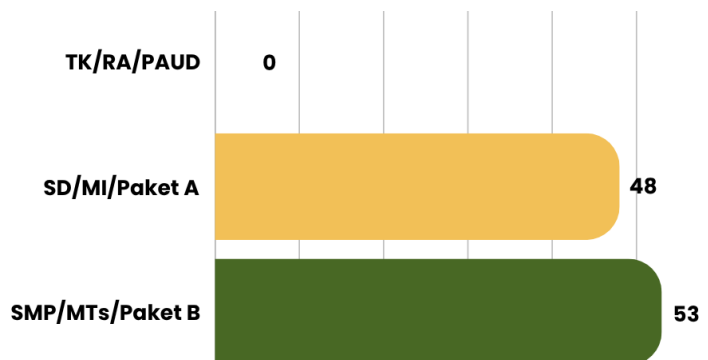
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mojokerto

Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan di Kota Mojokerto menunjukkan tingkat ketercapaian pendidikan sesuai dengan kelompok usia sekolah yang seharusnya. Pada jenjang TK/RA/PAUD, APM mencapai 89,54, yang berarti sebagian besar anak usia dini telah mengakses pendidikan pada jenjang ini. Sementara itu, pada jenjang SD/MI/Paket A, APM tercatat sebesar 110,58, menunjukkan bahwa terdapat anak usia lebih tua yang masih bersekolah di tingkat ini. Di jenjang SMP/MTs/Paket B, APM sebesar 106,67 juga menunjukkan fenomena serupa, yaitu adanya siswa di luar kelompok usia ideal yang masih bersekolah di tingkat menengah pertama.



**C. Angka Penduduk Putus Sekolah**

Angka putus sekolah di Kota Mojokerto menunjukkan jumlah penduduk yang tidak menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, akses pendidikan, dan kondisi sosial keluarga. Tingginya angka putus sekolah dapat menurunkan kualitas SDM dan memperbesar kesenjangan. Upaya seperti beasiswa dan pendidikan inklusif perlu terus dilakukan. Berikut data jumlah putus sekolah di Kota Mojokerto:



**Gambar 4.27** Jumlah Penduduk Putus Sekolah di Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mojokerto

Berdasarkan data di atas, tidak terdapat kasus putus sekolah pada tingkat TK/RA/PAUD. Sedangkan di jenjang pendidikan pada tingkat SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B terdapat kasus putus sekolah yaitu sebanyak 48 orang pada tingkat SD/MI/Paket A dan 53 orang pada tingkat SMP/MTs/Paket B. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa anak yang terdaftar di jenjang pendidikan tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikannya, sehingga menyebabkan putus sekolah.





### 4.2.3 Ekonomi

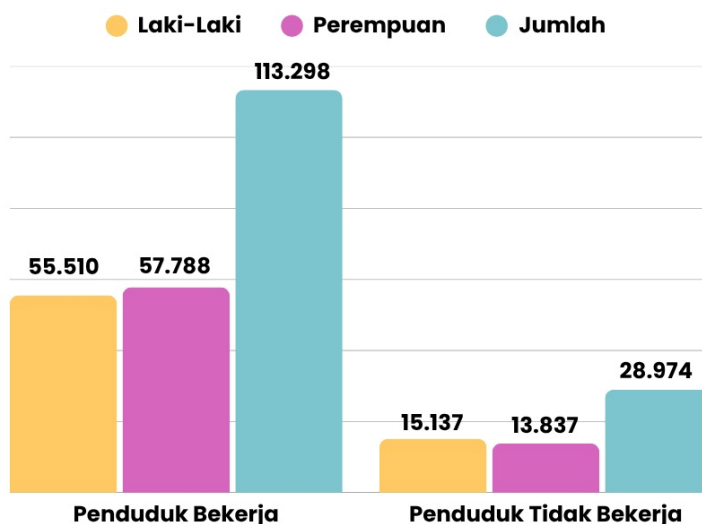
Ekonomi mencerminkan tingkat kesejahteraan, ketersediaan kerja, dan daya beli masyarakat. Indikator seperti pendapatan, sektor pekerjaan, dan pengangguran penting untuk menilai kondisi ekonomi suatu daerah. Analisis ini diperlukan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup.

#### A. Proporsi dan Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

Proporsi dan jumlah tenaga kerja serta angkatan kerja merupakan indikator utama dalam analisis ketenagakerjaan. Data ini penting untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat.

##### a) Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja dan Tidak Bekerja

Jumlah dan proporsi penduduk bekerja dan tidak bekerja mencerminkan kondisi ketenagakerjaan serta potensi pengangguran di suatu daerah. Data ini menunjukkan perbandingan persentase antara penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja. Berikut data Kota Mojokerto tahun 2024.



Gambar 4.28 Jumlah Penduduk Bekerja dan Tidak Bekerja di Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024



Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kota Mojokerto yang bekerja tercatat sebanyak 113.298 orang atau sekitar 79,63 persen dari total penduduk, sedangkan penduduk yang tidak bekerja berjumlah 28.974 orang atau 20,37 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, perempuan yang bekerja lebih banyak dibandingkan laki-laki, dengan jumlah 57.788 orang (80,68 persen dari total perempuan), sedangkan laki-laki yang bekerja sebanyak 55.510 orang (78,57 persen dari total laki-laki). Sementara, jumlah laki-laki yang tidak bekerja jauh lebih tinggi, yaitu 15.137 orang (21,43 persen dari total laki-laki), dibandingkan perempuan yang tidak bekerja sebanyak 13.837 orang (19,32 persen dari total perempuan). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kerja perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki di Kota Mojokerto.

#### B. Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan

Jumlah dan proporsi penduduk bekerja dan tidak bekerja mencerminkan kondisi ketenagakerjaan serta potensi pengangguran di suatu daerah. Data ini menunjukkan perbandingan persentase antara penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja. Berikut data Kota Mojokerto tahun 2024:

**Tabel 4.5** Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan di Kota Mojokerto Tahun 2024

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belum/Tidak Bekerja	15.137	13.837	28.974	20,37
2	Mengurus Rumah Tangga	4	26.444	26.448	18,59
3	Pelajar/Mahasiswa	14.058	13.224	27.282	19,18
4	Pensiunan	1.316	897	2.213	1,56
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.139	1.166	2.305	1,62
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	459	9	468	0,33



No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Kepolisian RI (POLRI)	361	32	393	0,28
8	Perdagangan	151	118	269	0,19
9	Petani/Pekebun	195	65	260	0,18
10	Peternak	8	2	10	0,01
11	Nelayan/Perikanan	1	0	1	0,00
12	Industri	68	12	80	0,06
13	Konstruksi	35	1	36	0,03
14	Transportasi	204	1	205	0,14
15	Karyawan Swasta	24.505	9.585	34.090	23,96
16	Karyawan BUMN	285	150	435	0,31
17	Karyawan BUMD	27	22	49	0,03
18	Karyawan Honorer	137	123	260	0,18
19	Buruh Harian Lepas	613	78	691	0,49
20	Buruh Tani/Perkebunan	91	28	119	0,08
21	Buruh Nelayan/Perikanan	1	0	1	0,00
22	Buruh Peternakan	2	0	2	0,00
23	Pembantu Rumah Tangga	0	90	90	0,06
24	Tukang Cukur	16	0	16	0,01
25	Tukang Listrik	13	0	13	0,01
26	Tukang Batu	359	0	359	0,25
27	Tukang Kayu	74	0	74	0,05
28	Tukang Sol Sepatu	257	0	257	0,18
29	Tukang Las/Pandai Besi	28	0	28	0,02
30	Tukang Jahit	70	63	133	0,09
31	Tukang Gigi	0	0	0	0,00
32	Penata Rias	0	12	12	0,01
33	Penata Busana	0	1	1	0,00
34	Penata Rambut	2	1	3	0,00
35	Mekanik	53	1	54	0,04
36	Seniman	13	8	21	0,01
37	Tabib	2	1	3	0,00
38	Paraji	2	1	3	0,00



No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39	Perancang Busana	1	4	5	0,00
40	Penerjemah	0	1	1	0,00
41	Imam Masjid	2	0	2	0,00
42	Pendeta	29	4	33	0,02
43	Pastor	4	0	4	0,00
44	Wartawan	12	3	15	0,01
45	Ustadz/Mubaligh	8	5	13	0,01
46	Juru Masak	2	0	2	0,01
47	Promotor Acara	0	0	0	0,00
48	Anggota DPR RI	0	1	1	0,00
49	Anggota DPD RI	0	0	0	0,00
50	Anggota BPK	0	0	0	0,00
51	Presiden	0	0	0	0,00
52	Wakil Presiden	0	0	0	0,00
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0	0,00
54	Anggota Kabinet Kementerian	0	0	0	0,00
55	Duta Besar	0	0	0	0,00
56	Gubernur	0	0	0	0,00
57	Wakil Gubernur	0	0	0	0,00
58	Bupati	0	0	0	0,00
59	Wakil Bupati	0	0	0	0,00
60	Walikota	0	1	1	0,00
61	Wakil Walikota	0	0	0	0,00
62	Anggota DPRD Prop.	1	0	1	0,00
63	Anggota DPRD Kab./Kota	6	3	9	0,01
64	Dosen	82	77	159	0,11
65	Guru	385	990	1.375	0,97
66	Pilot	1	0	1	0,00
67	Pengacara	11	3	14	0,01
68	Notaris	3	1	4	0,00
69	Arsitek	4	0	4	0,00
70	Akuntan	1	0	1	0,00



No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
71	Konsultan	5	0	5	0,00
72	Dokter	71	118	189	0,13
73	Bidan	0	94	94	0,07
74	Perawat	46	177	223	0,16
75	Apoteker	3	26	29	0,02
76	Psikiater/Psikolog	0	4	4	0,00
77	Penyiar Televisi	0	0	0	0,00
78	Penyiar Radio	1	1	2	0,00
79	Pelaut	17	0	17	0,01
80	Peneliti	0	0	0	0,00
81	Sopir	305	0	305	0,21
82	Pialang	0	0	0	0,00
83	Paranormal	1	0	1	0,00
84	Pedagang	1.239	918	2.157	1,52
85	Perangkat Desa	1	0	1	0,00
86	Kepala Desa	0	0	0	0,00
87	Biarawan/Biarawati	0	3	3	0,00
88	Wiraswasta	8.603	3.159	11.762	8,27
89	Anggota Lemb. Tinggi Lainnya	111	59	170	0,12
90	Artis	1	0	1	0,00
91	Atlit	0	0	0	0,00
92	Chef	0	0	0	0,00
93	Manajer	0	0	0	0,00
94	Tenaga Tata Usaha	0	0	0	0,00
95	Operator	0	0	0	0,00
96	Pekerja Pengolahan Kerajinan	0	0	0	0,00
97	Teknisi	0	0	0	0,00
98	Asisten Ahli	0	0	0	0,00
99	Pekerjaan Lainnya	5	1	6	0,00
Jumlah		70.647	71.625	142.272	100,00

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024



Pada tahun 2024, mayoritas penduduk Kota Mojokerto bekerja sebagai karyawan swasta (34.090 orang atau 23,96 persen), disusul wiraswasta (11.762 orang atau 8,27 persen). Pekerjaan sebagai PNS tercatat sebanyak 2.305 orang (1,62 persen), sementara sektor pertanian dan perikanan relatif kecil. Secara gender, perempuan lebih banyak berperan sebagai pengurus rumah tangga (26.444 orang), sedangkan laki-laki mendominasi sektor konstruksi, transportasi, dan industri.

#### 4.2.4 Sosial

Aspek sosial mencerminkan kualitas hidup dan dinamika kependudukan di Kota Mojokerto. Indikator seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan menjadi dasar perumusan kebijakan untuk mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.

##### A. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, seperti disabilitas, lansia terlantar, dan anak terlantar. Data PMKS di Kota Mojokerto penting untuk perencanaan kebijakan dan program sosial yang tepat sasaran.

**Tabel 4.6** Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Mojokerto Tahun 2024

No	PMKS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Keluarga Fakir Miskin	3.130	8.434	11.564
2	Anak Jalanan	-	-	-
3	Tuna Susila	-	-	-
4	Pengemis dan gelandangan			38
5	Anak Balita Terlantar	-	-	-
6	Anak Terlantar	-	-	-
7	Anak Berhadapan Dengan Hukum	2	3	5
8	Anak Dengan Kedisabilitasan	40	23	63
9	Anak Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	0	4	4



No	PMKS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
10	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-
11	Lanjut Usia Terlantar	8	15	23
12	Penyandang Disabilitas dan Penyakit Kronis	310	205	515
13	Pemulung	3	5	8
14	Kelompok Minoritas	15	0	15
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat	52	3	55
16	Orang dengan HIV/AIDS	0	0	117
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	5	0	5
18	Korban <i>Trafficking</i>	-	-	-
19	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	0	3	3
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-
21	Korban Bencana Alam			55.843
22	Korban Bencana Sosial	-	-	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0	514	514
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	-
25	Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil	-	-	-
Kota Mojokerto				68.772

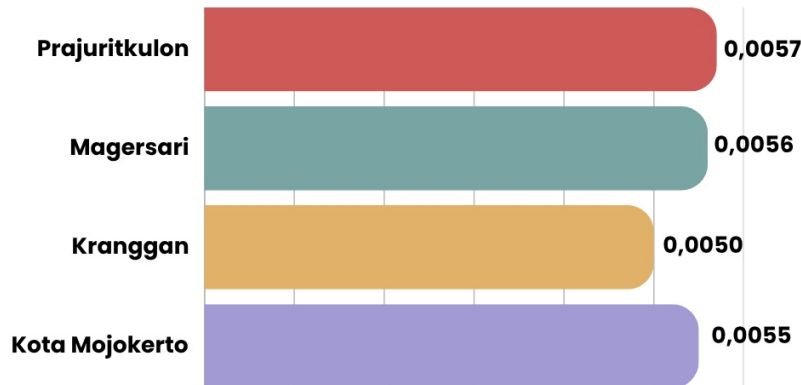
Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto

Pada tahun 2024, jumlah PMKS di Kota Mojokerto tercatat sebanyak 68.772 jiwa. Kategori terbesar adalah korban bencana alam (55.843 jiwa), disusul keluarga fakir miskin (11.564 jiwa), mencerminkan dampak besar bencana dan kemiskinan terhadap kesejahteraan sosial. Beberapa kategori PMKS tidak tercatat menurut jenis kelamin atau tidak dilaporkan, yang bisa disebabkan minimnya pelaporan atau keberhasilan program pencegahan. Data ini penting untuk perumusan kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran.



**B. Proporsi Penduduk yang Menyandang Disabilitas**

Disabilitas merupakan aspek penting dalam perencanaan pembangunan inklusif. Proporsi penyandang disabilitas mencerminkan akses dan layanan yang tersedia bagi mereka.



**Gambar 4.29** Proporsi Penduduk yang Menyandang Disabilitas di Kota Mojokerto Tahun 2024  
 Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024

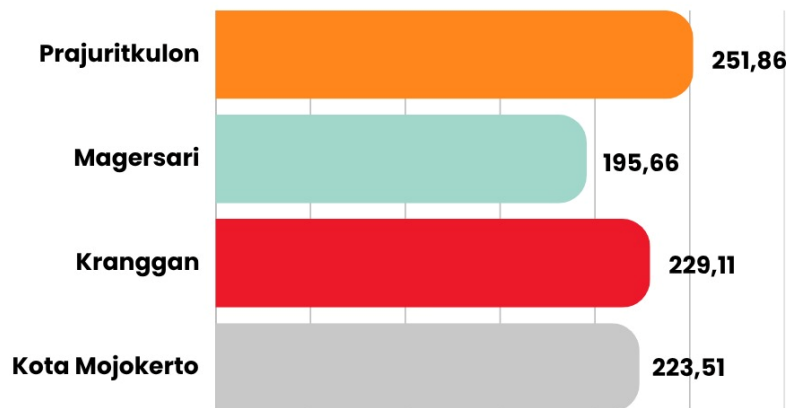
Proporsi penduduk penyandang disabilitas di Kota Mojokerto tahun 2024 menunjukkan bahwa sebesar 0,0055 persen. Kecamatan Magersari memiliki proporsi penyandang disabilitas tertinggi, yaitu sebesar 0,0056 persen. Meskipun proporsi penyandang disabilitas relatif kecil, data ini tetap menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan inklusif untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan penyandang disabilitas.





### C. Proporsi Penduduk Miskin Penerima Jaminan Kesehatan

Akses layanan kesehatan bagi penduduk miskin penting untuk menjamin pemerataan pelayanan medis. Program jaminan kesehatan bertujuan menghilangkan hambatan biaya dan meningkatkan akses. Data berikut menunjukkan proporsi penduduk miskin penerima jaminan kesehatan di Kota Mojokerto tahun 2024.



Gambar 4.30 Proporsi Penduduk Miskin Penerima Jaminan Kesehatan di Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto

Data di atas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin penerima jaminan kesehatan di Kota Mojokerto melebihi jumlah penduduk miskin yang tercatat oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto. Secara keseluruhan, proporsi penduduk miskin penerima jaminan kesehatan di Kota Mojokerto pada tahun 2024 sebesar 223,51 persen, dengan jumlah penduduk miskin penerima PBI sebanyak 25.936 jiwa dan jumlah penduduk miskin sebanyak 11.604 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan mekanisme pendataan antara penerima PBI dan jumlah penduduk miskin, atau adanya penduduk yang tetap tercatat sebagai penerima meskipun telah mengalami perbaikan kondisi ekonomi



### 4.3 Mobilitas Penduduk

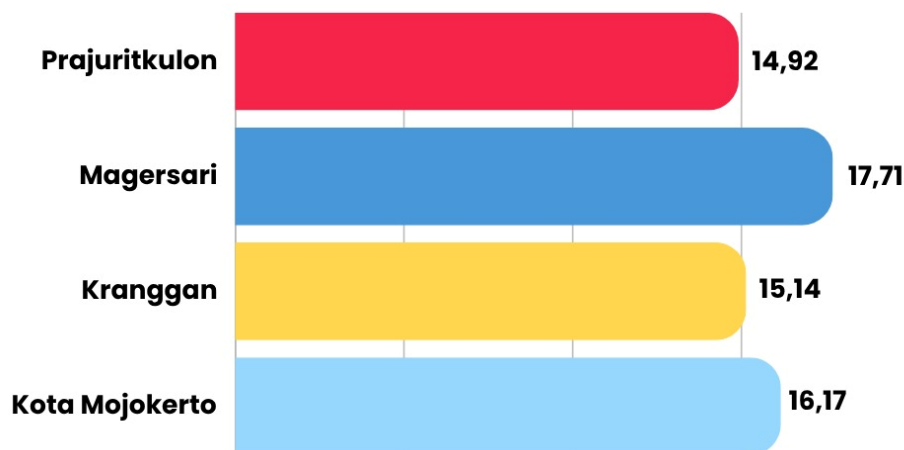
Mobilitas penduduk mencerminkan perpindahan masyarakat antarwilayah karena alasan pekerjaan, pendidikan, sosial, atau ekonomi. Di Kota Mojokerto, mobilitas ini memengaruhi struktur demografi dan perkembangan sosial ekonomi. Analisis pola mobilitas membantu memahami tren perpindahan dan dampaknya bagi pembangunan daerah.

#### 4.3.1 Mobilitas Permanen

Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk untuk menetap di wilayah lain dalam jangka panjang, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan ketersediaan fasilitas. Analisisnya penting untuk memahami dinamika dan dampak terhadap pembangunan daerah.

##### A. Angka Migrasi Masuk

Migrasi masuk menunjukkan jumlah penduduk yang pindah dan menetap di suatu wilayah dalam periode tertentu. Fenomena ini mencerminkan daya tarik daerah serta berdampak pada dinamika kependudukan dan kebutuhan layanan. Berikut data migrasi masuk di Kota Mojokerto tahun 2024:



Gambar 4.31 Angka Migrasi Masuk di Kota Mojokerto Tahun 2024

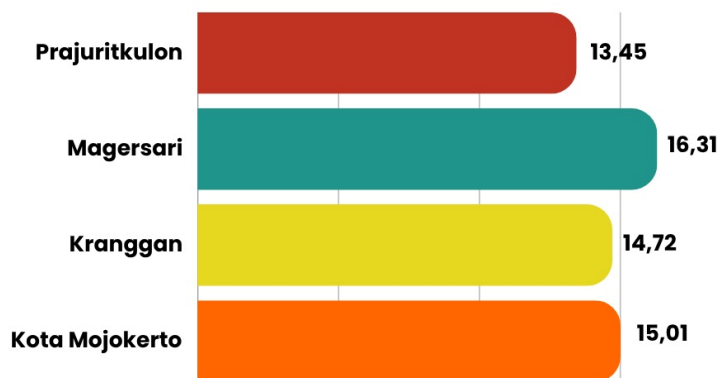
Sumber: Data Lampid Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Pada tahun 2024, Kota Mojokerto mencatat 16,17 per 1.000 penduduk migrasi masuk, dengan angka tertinggi di Kecamatan Magersari (17,71 per 1.000 penduduk), disusul Kranggan (15,14 per 1.000 penduduk) dan Prajuritkulon (14,92 per 1.000 penduduk).

### B. Angka Migrasi Keluar

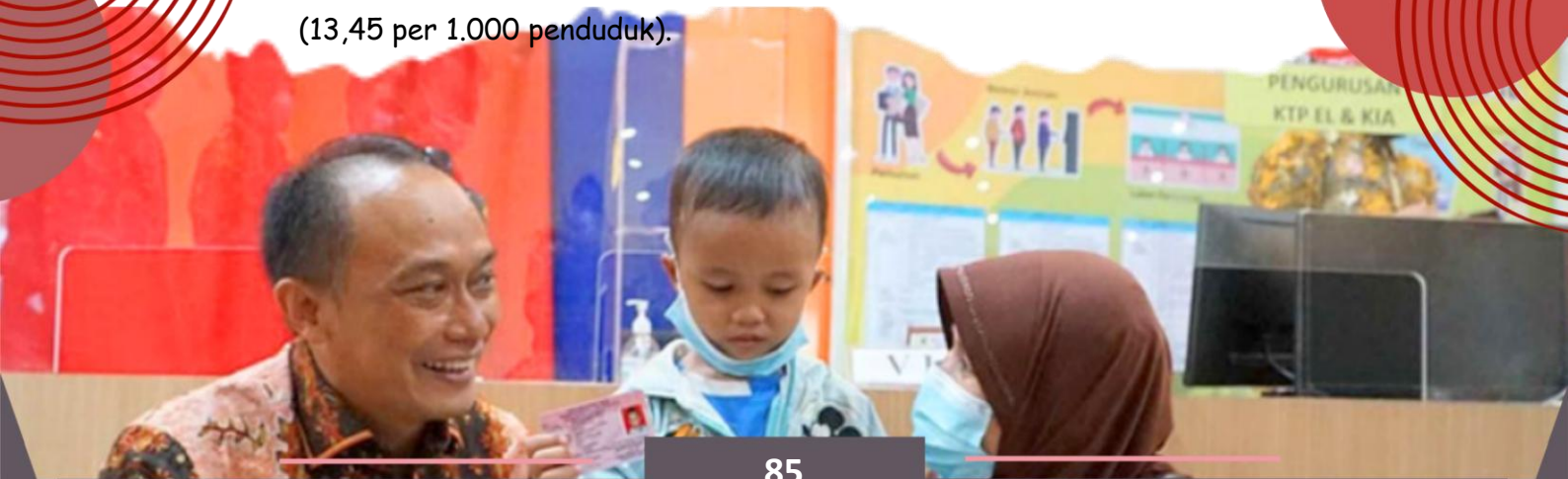
Migrasi keluar menunjukkan jumlah penduduk yang pindah dari Kota Mojokerto ke daerah lain dalam periode tertentu. Faktor penyebabnya antara lain pekerjaan, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi. Analisis ini penting untuk melihat dampaknya terhadap pembangunan daerah asal.



Gambar 4.32 Angka Migrasi Keluar di Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Data Lampid Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

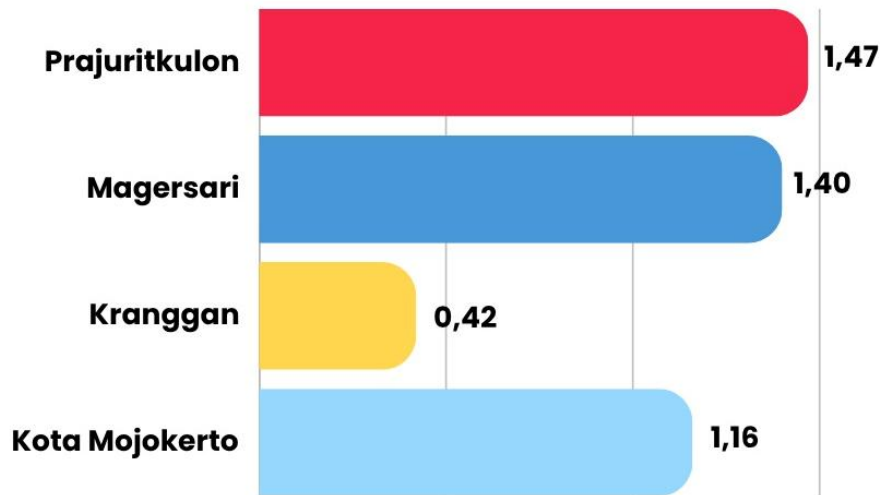
Pada tahun 2024, angka migrasi keluar sebesar 15,01 per 1.000 penduduk. Kecamatan Magersari mencatat angka tertinggi (16,31 per 1.000 penduduk), disusul Kranggan (14,72 per 1.000 penduduk) dan Prajuritkulon (13,45 per 1.000 penduduk).





### C. Angka Migrasi Neto

Angka migrasi neto menunjukkan selisih antara penduduk masuk dan keluar dalam suatu periode. Nilai positif menandakan penambahan penduduk, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan. Indikator ini mencerminkan daya tarik suatu wilayah. Data migrasi neto Kota Mojokerto tahun 2024 ditampilkan dalam grafik berikut:



Gambar 4.33 Angka Migrasi Neto di Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Data Lampid Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Data migrasi neto Kota Mojokerto tahun 2024 menunjukkan surplus migrasi sebesar 1,16 per 1.000 penduduk, menandakan lebih banyak penduduk masuk daripada keluar. Kecamatan Prajuritkulon mencatat angka tertinggi (1,47 per 1.000 penduduk), diikuti Magersari (1,40 per 1.000 penduduk), sedangkan Kranggan terendah (0,42 per 1.000 penduduk). Kondisi ini mencerminkan daya tarik Kota Mojokerto sebagai tempat tinggal dan bekerja, didorong oleh faktor ekonomi, lapangan kerja, dan fasilitas publik yang memadai.





### 4.3.2 Urbanisasi

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pekerjaan, dan fasilitas. Proses ini berdampak pada pertumbuhan penduduk dan perubahan sosial serta tata ruang kota, sehingga penting dianalisis untuk mendukung pembangunan kota berkelanjutan.

#### A. Persentase Penduduk Kota

Persentase penduduk kota menunjukkan proporsi warga yang tinggal di wilayah perkotaan dibanding total populasi. Indikator ini mencerminkan tingkat urbanisasi serta mendukung perencanaan pembangunan berbasis persebaran penduduk, ekonomi, dan infrastruktur.

**Tabel 4.7** Persentase Penduduk Kota di Kota Mojokerto Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Kota	Jumlah Penduduk Desa	Persentase Penduduk Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prajuritkulon	43.502	0	100,00
2	Magersari	60.588	0	100,00
3	Kranggan	38.182	0	100,00
<b>Kota Mojokerto</b>		<b>142.272</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024

Berdasarkan data persentase penduduk kota di Kota Mojokerto, terlihat bahwa seluruh penduduk di setiap kecamatan, yakni Prajuritkulon, Magersari, dan Kranggan, tinggal di wilayah perkotaan dengan persentase mencapai 100,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Mojokerto merupakan daerah dengan karakteristik urban sepenuhnya, tanpa adanya wilayah perdesaan dalam batas administratifnya. Dengan demikian, seluruh kebijakan pembangunan dan layanan publik harus berorientasi pada kebutuhan perkotaan, seperti pengelolaan tata ruang, transportasi, permukiman, serta penyediaan fasilitas umum yang mendukung kehidupan masyarakat di lingkungan urban.



## B. Rasio Kota dan Desa

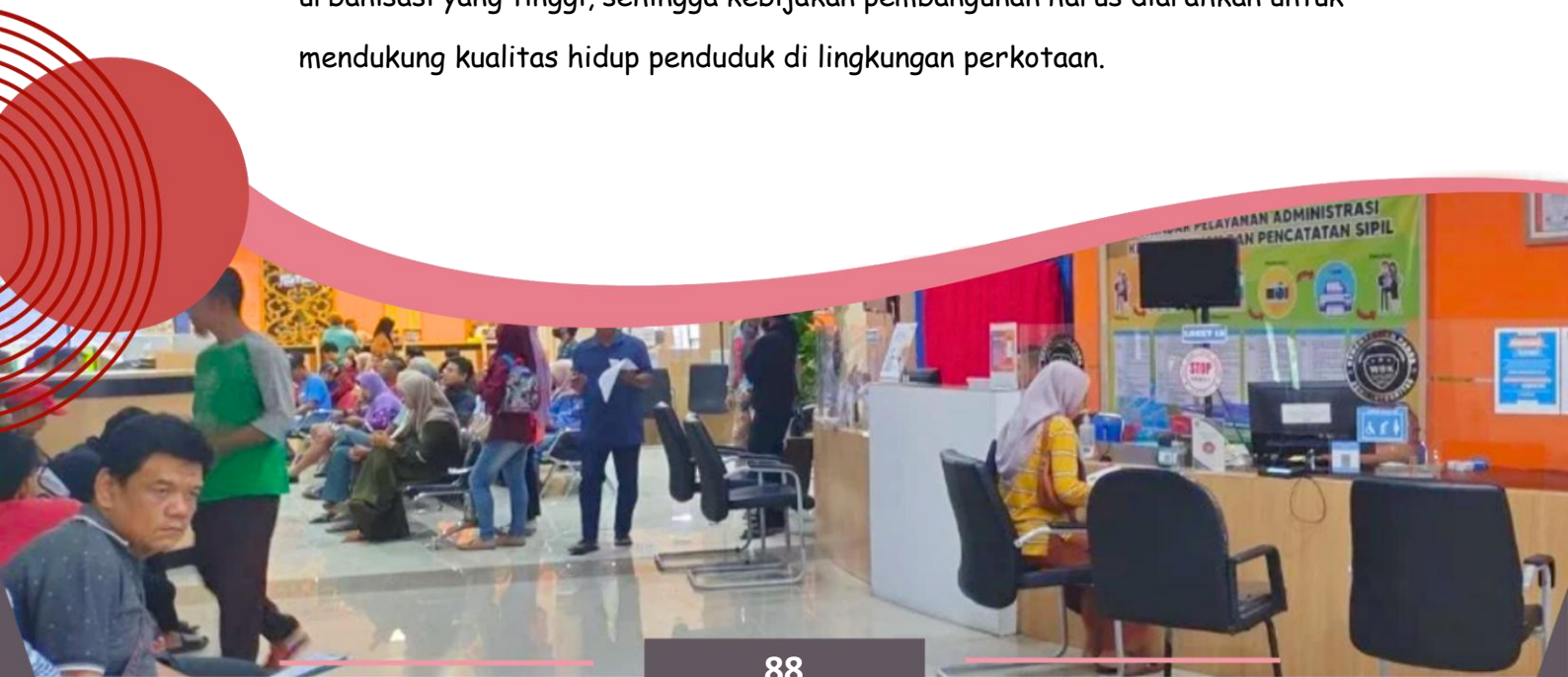
Rasio kota dan desa menunjukkan perbandingan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dan perdesaan. Indikator ini penting untuk merancang kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi demografis dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Tabel 4.8 Rasio Kota dan Desa di Kota Mojokerto Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Kota	Jumlah Penduduk Desa	Rasio Kota dan Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prajuritkulon	43.502	0	100,00
2	Magersari	60.588	0	100,00
3	Kranggan	38.182	0	100,00
Kota Mojokerto		142.272	0	100,00

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024

Berdasarkan data rasio kota dan desa di Kota Mojokerto, terlihat bahwa seluruh penduduk di tiga kecamatan, yaitu Prajuritkulon, Magersari dan Kranggan tinggal di wilayah perkotaan dengan rasio 100,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Mojokerto merupakan wilayah dengan karakteristik sepenuhnya perkotaan tanpa adanya penduduk yang tinggal di perdesaan. Kondisi ini juga mencerminkan bahwa Kota Mojokerto memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi, sehingga kebijakan pembangunan harus diarahkan untuk mendukung kualitas hidup penduduk di lingkungan perkotaan.



# BAB V

## KEPEMILIKAN

### DOKUMEN

#### KEPENDUDUKAN





## BAB V KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran merupakan bukti legal identitas yang penting untuk mengakses layanan publik dan hak-hak warga. Analisis kepemilikan dokumen ini mencerminkan efektivitas pelayanan administrasi dan kesadaran masyarakat di Kota Mojokerto.

### 5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) adalah dokumen resmi yang memuat data lengkap anggota keluarga dan wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Data ini mencerminkan cakupan administrasi kependudukan di Kota Mojokerto. Berikut merupakan kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Mojokerto pada tahun 2024.

Prajuritkulon	100,00
Magersari	100,00
Kranggan	100,00

Gambar 5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024

Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kota Mojokerto tahun 2024 mencapai 100,00 persen, dengan seluruh 48.373 kepala keluarga di tiga kecamatan—Prajuritkulon, Magersari, dan Kranggan—telah memiliki KK.



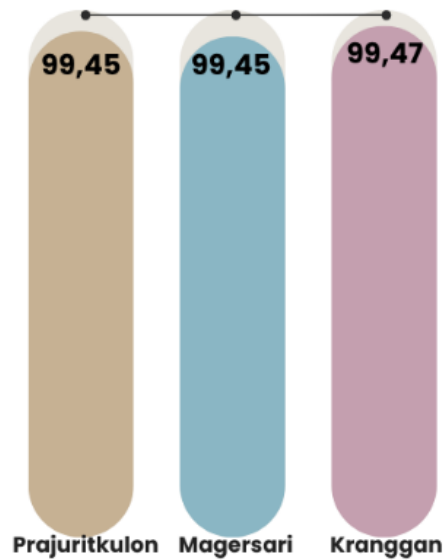
### 5.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

KTP elektronik (KTP-el) adalah dokumen identitas wajib bagi penduduk usia wajib KTP dan menjadi dasar akses layanan publik. Tingkat kepemilikan KTP-el mencerminkan efektivitas layanan administrasi kependudukan di Kota Mojokerto.

Tabel 5.1 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Mojokerto Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP-el	Jumlah Penduduk Wajib Ber-KTP-el	Kepemilikan KTP-el
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3):(4)×100
1	Prajuritkulon	31.736	31.910	99,45
2	Magersari	45.287	45.536	99,45
3	Kranggan	28.494	28.647	99,47
Kota Mojokerto		105.517	106.093	99,46

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024



Gambar 5.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024



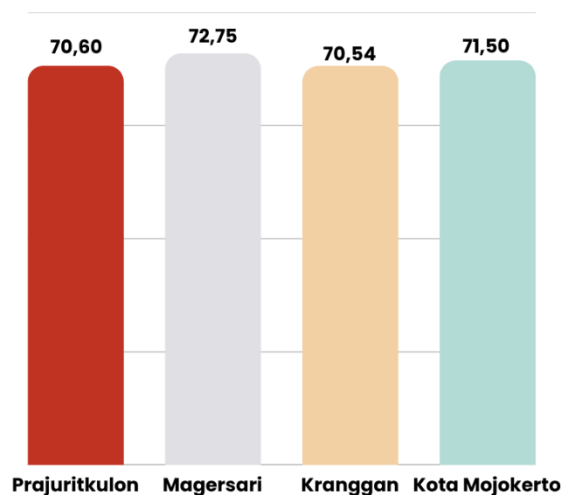
Tingkat kepemilikan KTP elektronik (KTP-el) di Kota Mojokerto tahun 2024 mencapai 99,46 persen, dengan 105.517 dari 106.093 penduduk wajib KTP-el telah memilikinya. Kecamatan Kranggan mencatat kepemilikan tertinggi sebesar 99,47 persen. Capaian ini mencerminkan kepatuhan administrasi yang tinggi, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan untuk menjangkau penduduk yang belum memiliki KTP-el.

### 5.3 Kepemilikan Akta

Akta kependudukan, seperti akta kelahiran, perkawinan, dan kematian, merupakan bukti legal status sipil seseorang. Tingginya tingkat kepemilikan akta mencerminkan kesadaran masyarakat dan efektivitas layanan administrasi di Kota Mojokerto.

#### 5.3.1 Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti hukum hubungan anak dengan orang tua serta dibutuhkan dalam pengurusan pendidikan dan dokumen lain. Layanan ini disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.



Gambar 5.3 Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun di Kota Mojokerto Tahun 2024

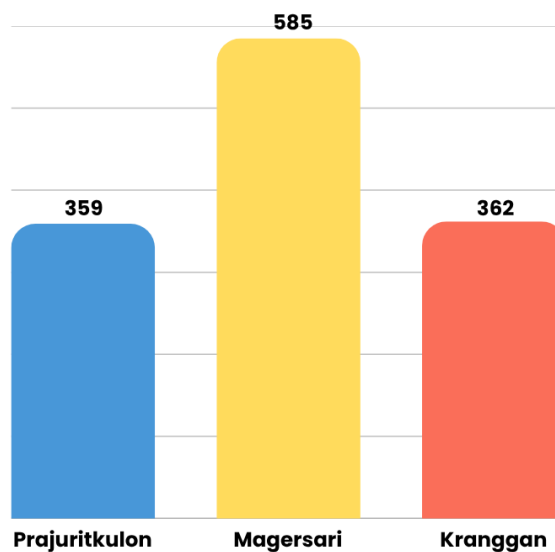
Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024



Tingkat kepemilikan akta kelahiran di Kota Mojokerto tahun 2024 mencapai 71,50 persen. Kecamatan Magersari mencatat persentase tertinggi (72,75 persen), disusul Prajuritkulon (70,60 persen) dan Kranggan (70,54 persen).

### 5.3.2 Akta Kematian

Setiap kematian wajib dilaporkan ke Disdukcapil paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian, sesuai UU No. 24 Tahun 2013. Laporan dilakukan oleh ketua RT atau sebutan lainnya, dan akan dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kematian untuk kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Berikut merupakan penerbitan akta kematian di Kota Mojokerto pada tahun 2024.



**Gambar 5.4** Jumlah Penerbitan Akta Kematian di Kota Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, penerbitan akta kematian di Kota Mojokerto mencapai 1.306 dokumen. Kecamatan Magersari mencatat jumlah tertinggi dengan 585 akta, disusul Kecamatan Kranggan sebanyak 362 akta, dan Kecamatan Prajuritkulon sebanyak 359 akta.

# BAB VI

# PENUTUP





## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

#### 1. Kuantitas Penduduk

- a) Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Kota Mojokerto mencapai 142.272 jiwa, menunjukkan dominasi jumlah perempuan. Kepadatan penduduk rata-rata sebesar 7.038 jiwa/km<sup>2</sup> dengan Kecamatan Kranggan sebagai wilayah terpadat. Laju pertumbuhan penduduk Kota Mojokerto mengalami peningkatan sebesar 0,34 persen.
- b) Persebaran penduduk di Kota Mojokerto tahun 2024 lebih didominasi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan, hal ini ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin di Kota Mojokerto sebesar 98,63 persen. Rasio ketergantungan penduduk sebesar 42,25 persen, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-59 tahun) harus menanggung sebanyak 42-43 orang. Rata-rata jumlah anggota keluarga adalah sebanyak 3 anggota keluarga. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, mayoritas penduduk Kota Mojokerto memiliki latar belakang Pendidikan SLTA/Sederajat dan beragama Islam. Jumlah penyandang disabilitas tercatat sebanyak 779 jiwa. Jumlah kelahiran sebanyak 1.015 kelahiran bayi dengan angka kelahiran kasar tercatat sebesar 7,13 dari 1.000 penduduk. Sedangkan tercatat jumlah kematian sebesar 1.306 dengan angka kematian kasar sebesar 9,18 dari 1.000 penduduk.



## 2. Kualitas Penduduk

- a) Dilihat dari sektor kesehatan, rasio anak dan perempuan di Kota Mojokerto sebesar 23,47. Sementara angka kematian bayi sebesar 2,96, angka kematian bayi neonatal sebesar 2,96, angka kematian anak sebesar 1,97, dan angka kematian balita sebesar 4,93.
- b) Dilihat dari sektor pendidikan, APK jenjang pendidikan TK/RA/PAUD sebesar 132,76 persen, jenjang SD/MI/Paket A sebesar 116,49 persen, dan jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 117,80 persen. APM jenjang pendidikan TK/RA/PAUD sebesar 89,54 persen, jenjang SD/MI/Paket A sebesar 110,58 persen, dan jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 106,67. Sementara itu, tidak terdapat kasus putus sekolah pada tingkat TK/RA/PAUD. Sedangkan di jenjang pendidikan yang lain terdapat kasus putus sekolah yaitu sebanyak 48 orang pada tingkat SD/MI/Paket A dan 53 orang pada tingkat SMP/MTs/Paket B.
- c) Selanjutnya jika dilihat dari sektor ekonomi, jumlah penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 113.298 jiwa, mayoritas bekerja sebagai karyawan swasta, sementara penduduk yang tidak bekerja sebanyak 28.974 jiwa.
- d) Dari sektor sosial, jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Mojokerto pada tahun 2024 sebanyak 68.772 jiwa. Proporsi penyandang disabilitas sebesar 0,0055 persen. Proporsi penduduk miskin penerima jaminan kesehatan di Kota Mojokerto tercatat sebanyak 25.936 jiwa.



### 3. Mobilitas Penduduk

- a) Berdasarkan data yang tersedia, angka migrasi masuk di Kota Mojokerto pada tahun 2024 tercatat sebesar 16,17 per 1.000 jiwa penduduk, sementara angka migrasi keluar tercatat sebesar 15,01 per 1.000 jiwa penduduk. Dengan demikian, angka migrasi neto di Kota Mojokerto tahun 2024 tercatat sebesar 1,16 per 1.000 jiwa penduduk, yang menunjukkan bahwa Kota Mojokerto masih memiliki daya tarik sebagai tempat Tujuan bagi penduduk dari wilayah lain.
- b) Persentase penduduk kota di Kota Mojokerto secara keseluruhan telah mencapai 100,00 persen.

### 4. Kepemilikan Dokumen Kependudukan

- a) Kepemilikan dokumen Kartu Keluarga (KK) di Kota Mojokerto pada tahun 2024 secara keseluruhan telah mencapai 100,00 persen.
- b) Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Mojokerto pada tahun 2024 sebesar 99,46 persen.
- c) Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun di Kota Mojokerto sebesar 71,50 persen. Penerbitan akta kematian di Kota Mojokerto tercatat sebanyak 1.306 akta kematian.





**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Mojokerto**

***Jl. Gajah Mada No. 100 Balongsari, Mergelo, Kec. Magersari,  
Kota Mojokerto, Jawa Timur 61314***